



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**



**LAPORAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2021**



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021 dapat selesai dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kediri Tahun 2021.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2021 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026. Dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar Peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator tujuan dan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Kediri Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD Tahun 2016-2021 dan sekaligus menjadi target kinerja RKPD Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 disusun berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 dengan mempertimbangkan prioritas program/ kegiatan untuk mewujudkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan sebanyak 28 sasaran setrategis dengan 37 Indikator. Beberapa prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten Kediri selama tahun 2021 antara lain memperoleh penghargaan kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dari berbagai instansi pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Kediri agar memacu kinerja kedepan lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.



Sedangkan, untuk beberapa target kinerja yang belum dapat dicapai dengan predikat sangat efisien, Pemerintah Kabupaten Kediri dan jajarannya akan bekerja untuk meningkatkannya ditahun-tahun mendatang. Semoga Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kediri agar memacu kinerja kedepan lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kediri.

Kediri, 21 Maret 2022

BUPATI KEDIRI

H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, SH



## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel dan Grafik .....	iv
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Dasar Hukum .....	1-5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-7
1.4 Gambaran Umum Daerah.....	1-8
1.5 Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan.....	1-14
1.6 Organisasi dan Sumber Daya Aparatur.....	1-17
1.7 Kerangka Penerapan SAKIP Kabupaten Kediri.....	1-22
1.8 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	1-23
<b>BAB II</b> <b>PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Kinerja.....	2-1
2.2 Perjanjian Kinerja Kabupaten Kediri 2021.....	2-17
2.3 Ringkasan APBD Tahun 2021.....	2-24
<b>BAB III</b> <b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021.....	3-2
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Akhir Periode RPJMD.....	3-20
3.3 Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	3-25
3.4 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	3-30
3.5 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan.....	3-36
3.6 Realisasi Anggaran.....	3-70
<b>BAB IV</b> <b>PENUTUP</b> .....	4-1
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

### Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	1-9
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Per Kecamatan .....	1-10
Tabel 1.3 Aplikasi Sistem Informasi .....	1-15
Tabel 1.4 Jumlah PNS berdasarkan Golongan Ruang dan Pendidikan .....	1-20
Tabel 1.5 Jumlah PNS berdasarkan Golongan Ruang, Eselon dan Non Eselon.....	1-21
Tabel 2.1 Matriks Hubungan Antara Misi dan Tujuan.....	2-4
Tabel 2.2 Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran .....	2-6
Tabel 2.3 Ringkasan APBD 2021 .....	2-24
Tabel 3.1 Pengukuran Indikator Tujuan Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2016 - 2021 .....	3-3
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021.....	3-7
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2021.....	3-9
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya .....	3-13
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Akhir Periode RPJMD.....	3-20
Tabel 3.6 Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	3-25
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021.....	3-30
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	3-70

### Daftar Grafik

Grafik 1.1 Data Penduduk Kabupaten Kediri Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	1-9
Grafik 1.2 Perkembangan IPM Kabupaten Kediri 2016-2021 .....	1-11
Grafik 1.3 Perkembangan PDRB per Kapita Kab. Kediri .....	1-12
Grafik 1.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Kediri .....	1-13
Grafik 1.5 Angka Inflasi Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.....	1-13



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pelaporan kinerja adalah proses penting dalam mewujudkan tata pemerintah baik. Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pelaporan Kinerja dalam tata pemerintahan adalah tahap ke-4 dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e) pelaporan kinerja, dan f) reviu dan evaluasi kinerja (pasal 5). Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja.

#### **Bab 1 Berisi:**

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Gambaran Umum Daerah
5. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan
6. Organisasi dan Sumber Daya Aparatur
7. Kerangka Penerapan SAKIP
8. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja



Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan; dan ditegaskan bahwa kepada para Bupati/Walikota untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden setiap akhir tahun anggaran.

Sedangkan, mekanisme tahapan teknis, substansi dan keterlibatan satuan kerja dalam penyusunan pelaporan kinerja, secara tegas telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah harus mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kediri telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan strategis daerah. Peraturan daerah ini menetapkan sebanyak **15 misi** yang diuraikan ke dalam **15 tujuan** dan **28 sasaran** strategis pemerintah daerah yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. Pencapaian sasaran strategis tahun 2021 dilakukan dengan menetapkan Rencana Kerja



Pemerintah Daerah tahun 2021 dengan memberikan prioritas kepada beberapa program yang mana beberapa diantaranya adalah Program Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Penjabaran **15 misi** Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 dijabarkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmoni;
2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman;
4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
5. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan;
6. Menumbuhkembangkan kreativitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro;
7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah;
8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan;
9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha;
10. memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah perdesaan khususnya perempuan;



11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi;
12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang;
13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi
14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang;
15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan untuk Perencanaan Strategis Tahun 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Kediri telah menetapkan Perda Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 dengan Visi “ **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Birokrasi yang melayani** “ serta diuraikan dalam 9 Misi :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius;
2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah;
4. Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan;
5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah;
6. Optimalisasi Kepariwisata berbasis Kearifan Lokal;
7. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana;
8. Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda;
9. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Pencapaian misi dijabarkan dalam tujuan yang nantinya diturunkan menjadi sasaran strategis. Sementara itu langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk mencapai Sasaran strategis dilakukan dengan sinkronisasi dan sinergitas kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga kebijakan dan strategi pencapaian



yang dilakukan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal. Arah kebijakan dan strategi pencapaian kinerja oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan dilandasi semangat Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024*.

Selain itu, Untuk memudahkan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kabupaten Kediri.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, *transparan, profesional dan akuntabel*. Setiap penyelenggara pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan ukuran keberhasilan yang diharapkan.

Dengan semangat mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kediri 2016-2021 yaitu **“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”**. serta komitmen melaksanakan misi ke-11 yaitu “mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi”, Pemerintah Kabupaten Kediri menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 tersebut (yang telah menyajikan indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Kepala Daerah) disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/BAPPENAS dan Gubernur sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian



Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021 ini adalah:

- a. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- c. Undang undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- d. Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
- e. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- j. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024
- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005 – 2025;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Kediri;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri ;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026;
- u. Peraturan Bupati Kediri Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021;
- v. Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/354/418.08/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, sebagaimana Peraturan



Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan akuntabilitas kinerja ini disusun berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini dimaksudkan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021 secara manajerial kepada pemerintah pusat dan seluruh *stakeholder* (DPRD dan masyarakat), dengan tujuan:

- a. Menjadikan Pemerintah Kabupaten Kediri yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tenteram, tertib, dan kondusif;
- b. Memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021, yang merupakan periode tahun **ke-lima** dalam kerangka perencanaan jangka menengah, dokumen RPJMD 2016-2021;
- c. Sebagai media evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021, dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang;
- d. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
- e. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Kediri terhadap penyelenggaraan Pemerintahan.

Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## 1.4. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Kediri adalah satu dari 38 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur. Wilayahnya terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur yang membentang antara  $111^{\circ} 47' 05''$  s/d  $112^{\circ} 18' 20''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 36' 12''$  s/d  $8^{\circ} 0' 32''$  Lintang Selatan. Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah sebesar 1.563,42 Km<sup>2</sup> atau 153.642 Ha yang terbagi menjadi 26 kecamatan, dengan 344 kelurahan/desa. Topografi wilayah yang cukup beragam dengan rata-rata ketinggian tanah diantara 0 – 500 meter dari permukaan laut (dpl). Wilayah bagian utara-selatan Kabupaten Kediri merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 200 meter dpl, sementara pada wilayah bagian barat-timur merupakan wilayah perbukitan dan bergelombang. Berdasarkan topografinya, wilayah Kabupaten Kediri terbagi menjadi 4 (empat).

Kabupaten Kediri memiliki Sungai Brantas yang membelah wilayahnya dan bahkan menjadi faktor klasifikasi karakteristik geologis wilayahnya. Menurut ini karakteristik wilayah Kabupaten Kediri dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 1) Bagian Barat Sungai Brantas, merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok, sebagian besar merupakan daerah kurang subur; 2) Bagian Tengah, merupakan dataran rendah yang sangat subur, melintas aliran Sungai Brantas dari selatan ke utara yang membelah wilayah Kabupaten Kediri; dan 3) Bagian Timur Sungai Brantas, merupakan perbukitan kurang subur yang membentang dari Gunung Argowayang di bagian utara dan Gunung Kelud di bagian selatan. Wilayah tersebut berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lain, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malang



Gambar 1.1: Peta Kabupaten Kediri



dan Kabupaten Jombang serta sebelah barat adalah Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung.

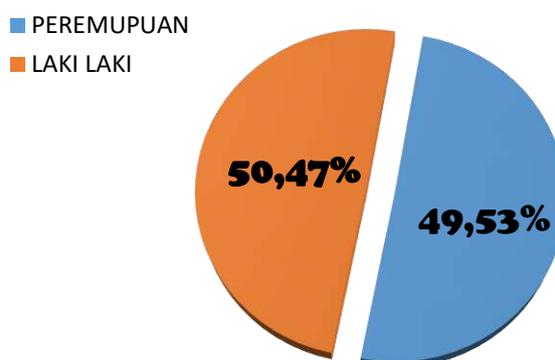
Wilayah Kabupaten Kediri yang berdekatan dengan kawasan gunung berapi dan pegunungan lain, memiliki potensi bencana cukup tinggi. Di Kabupaten Kediri, sedikitnya terdapat empat kecamatan dari 26 yang masuk kawasan bahaya gunung berapi. Keempat kecamatan itu yakni, Kecamatan Ngancar, Puncu, Kepung dan Kecamatan Wates. Di wilayah barat sungai Brantas yang merupakan wilayah pegunungan, memiliki potensi bencana longsor. Untuk Gunung Kelud sebagai gunung berapi aktif, berpotensi untuk terjadi erupsi kembali. Pemerintah Kabupaten Kediri mengambil langkah dengan menyusun dokumen perencanaan strategis mitigasi bencana, pemberdayaan masyarakat terhadap tanggap bencana, dan ini sosialisasi dan internalisasi rencana pengetahuan tanggap bencana bagi siswa-siswa sekolah menjadi salah satu materi bahan muatan lokal kurikulum pendidikan.

Tabel 1.1  
Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri berdasar Jenis Kelamin  
Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	n(Jiwa)	Prosentase(%)
1.	Laki – laki	830.320	50.47
2.	Perempuan	814.090	49.53
<b>Kabupaten Kediri</b>		<b>1.664.410</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Agregat Kependudukan Dispendukcapil Tahun 2021

Grafik 1.1  
Data Penduduk Kabupaten Kediri Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021



Sumber : Data Agregat Kependudukan Dispendukcapil Tahun 2021



Tabel 1.2.  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Per Kecamatan

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		PENDUDUK		JUMLAH DESA
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	n(Jiwa)	%	
		n(Jiwa)	n(Jiwa)			
1	MOJO	41,00	39,01	80,01	4,87	20
2	SEMEN	28,02	27,02	55,04	3,35	12
3	NGADILUWIH	40,22	40,23	80,45	4,89	16
4	KRAS	31,61	31,45	63,06	3,83	16
5	RINGINREJO	29,12	28,34	57,46	3,49	11
6	KANDAT	31,52	31,21	62,73	3,81	12
7	WATES	45,87	45,37	91,24	5,55	18
8	NGANCAR	25,64	25,18	50,82	3,09	10
9	PLOSOKLATEN	37,78	36,99	74,77	4,55	15
10	GURAH	41,79	41,09	82,88	5,04	21
11	PUNCU	32,53	31,48	64,02	3,89	8
12	KEPUNG	43,59	42,08	85,67	5,21	10
13	KANDANGAN	26,21	25,80	52,01	3,16	12
14	PARE	53,51	52,94	106,45	6,47	10
15	BADAS	34,63	33,29	67,92	4,13	8
16	KUNJANG	18,63	18,34	36,97	2,25	12
17	PLEMAHAN	30,70	30,27	60,96	3,71	17
18	PURWOASRI	29,62	29,64	59,26	3,60	23
19	PAPAR	26,45	26,19	52,63	3,20	17
20	PAGU	20,31	20,10	40,41	2,46	13
21	KAYEN KIDUL	23,74	23,65	47,39	2,88	12
22	GAMPENGREJO	18,06	17,73	35,79	2,18	11
23	NGASEM	33,57	33,71	67,28	4,09	12
24	BANYAKAN	29,85	28,95	58,80	3,58	9
25	GROGOL	24,43	23,27	47,70	2,90	9
26	TAROKAN	31,92	30,77	62,69	3,81	10
<b>KAB. KEDIRI</b>		<b>830,320</b>	<b>814,090</b>	<b>1.644.410</b>	<b>100</b>	<b>344</b>

Sumber: BPS Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Kediri terbagi dalam 26 Kecamatan dengan jumlah desa mencapai 344.

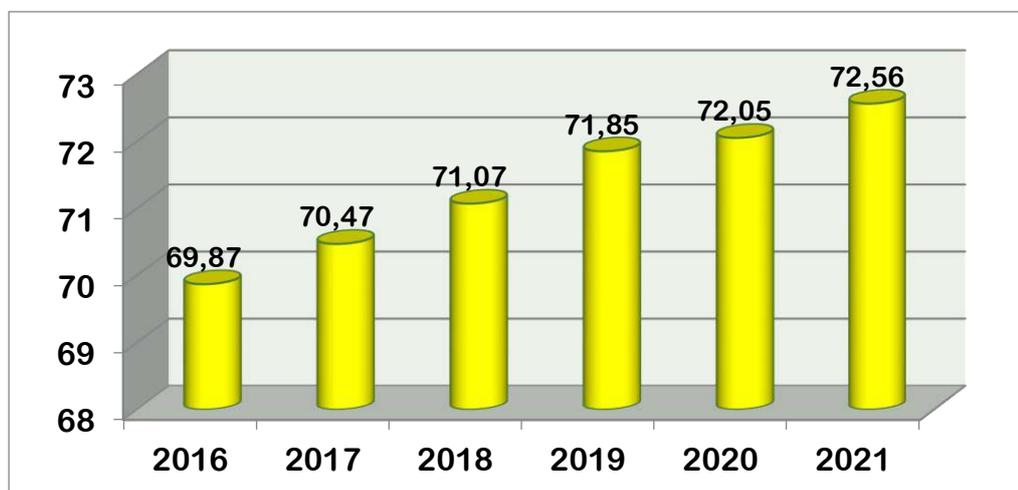
Berkaitan dengan perkembangan jumlah penduduk dan usia produktif angkatan kerja, Pemerintah Kabupaten Kediri terus berupaya untuk meningkatkan serapan jumlah tenaga kerja yang ada, berbagai program pelatihan dan fasilitasi dengan dunia kerja terus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja. Program yang



dilakukan adalah peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan antara lain: pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, pembinaan Lembaga Latihan Swasta (LLS) dan informasi bursa tenaga kerja melalui penempatan tenaga kerja.

Terhadap indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri terus mengalami peningkatan mulai tahun 2016 sampai 2021. Pada Tahun 2016 IPM **69,87** di Tahun 2017 IPM meningkat menjadi **70,47**, Tahun 2018 IPM meningkat **71,07**, kemudian Pada Tahun 2019 meningkat menjadi **71,85** , kemudian pada Tahun 2020 IPM **72,05**, pada akhir Tahun 2021 IPM sudah diangka **72,56**. IPM merupakan skor agregat dari tiga dimensi, yaitu Dimensi Kesehatan, Dimensi Pengetahuan, dan Dimensi Standar Hidup Layak. Kenaikan IPM ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri sangat konsisten dan peduli terhadap program-program peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kediri selama 2016-2021 sebagaimana grafik berikut :

**Grafik 1.2**  
**Perkembangan IPM Kabupaten Kediri 2016-2021**



Sumber: Data BPS Tahun 2021

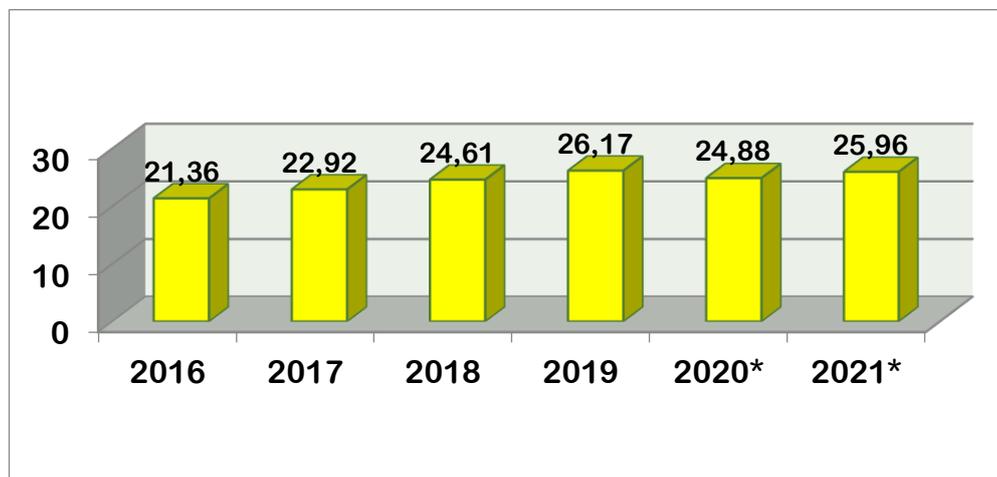
Gambaran kondisi ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator yang meliputi potensi unggulan daerah, pertumbuhan ekonomi sektoral dan Produk Domestik Bruto (PDRB). Sektor pertanian merupakan potensi unggulan daerah mengingat dominannya kontribusi sektor pertanian pada PDRB Kabupaten Kediri. Pengembangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan melalui pola



agrobisnis/agroindustri yang didukung oleh kegiatan perdagangan besar dan eceran sebagai suatu sistem yang utuh dan saling terkait melalui pengembangan secara bertahap kawasan agropolitan yang merupakan wadah keterpaduan fungsional antara berbagai program dan kegiatan lintas sektoral dalam mengembangkan pertanian. Potensi unggulan daerah berikut adalah bidang kepariwisataan. Kabupaten Kediri memiliki banyak obyek wisata baik wisata alam/buatan, sejarah dan religi yang terus dikembangkan sehingga memberikan manfaat ekonomis secara langsung bagi masyarakat dan memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Perhitungan PDRB akan menghasilkan gambaran mengenai volume ekonomi dan perkembangannya. Perkembangan PDRB per Kapita di Kabupaten Kediri dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Grafik 1.3**  
**Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Kediri**  
**Tahun 2016-2021**



Sumber: Data BPS Tahun 2021

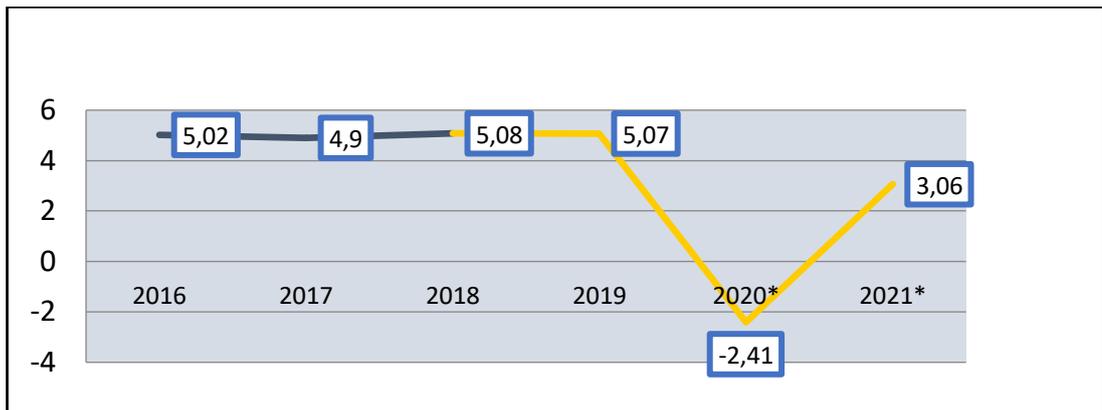
\*Angka Sementara

Kondisi perekonomian Kabupaten Kediri dalam rentang waktu empat tahun terakhir mengalami fluktuatif, dimana Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%, di Tahun 2017 pertumbuhan mengalami penurunan menjadi sebesar 4,9%. Pada Tahun 2018 naik menjadi sebesar 5,08%. Pada Tahun 2019 sebesar 5,07. Pada tahun 2020 turun menjadi -2,41 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan menjadi 3,06.



Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri dapat dilihat sebagaimana grafik berikut:

**Grafik 1.4**  
**Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kediri**  
**Tahun 2017-2021**

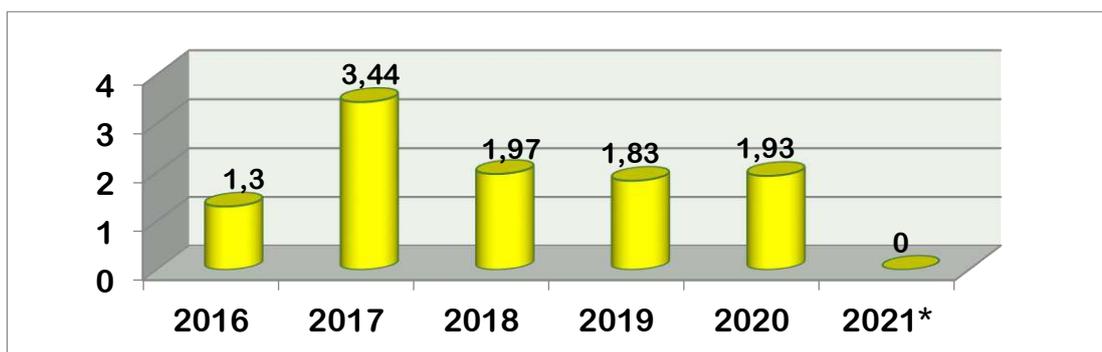


Sumber: Data BPS Tahun 2021

\*Angka sementara

Sedangkan tingkat inflasi di Kabupaten Kediri selama enam tahun terakhir bisa dilihat di tabel dibawah ini :

**Grafik 1.5**  
**Angka Inflasi Kabupaten Kediri**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber : Data BPS Tahun 2021

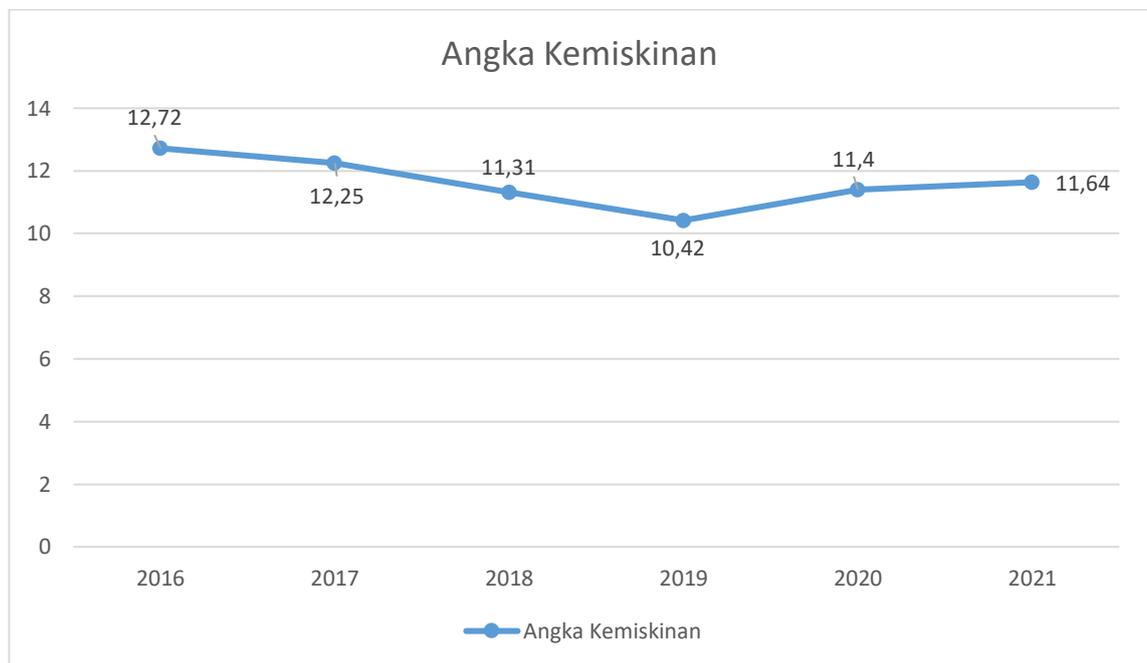
\*Angka sementara

Pemerintah Kabupaten Kediri berhasil menekan tingkat inflasi pada Tahun 2020 hingga sebanyak 1,93%, tingkat inflasi tersebut termasuk rendah jika dibandingkan daerah lain di Jawa – Bali



Pemerintah Kabupaten Kediri berhasil menurunkan angka kemiskinan dari tahun 2016 sampai tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 angka kemiskinan meningkat namun tidak terlalu tajam di karenakan adanya pandemi Covid-19 yang membuat sebagian warga kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Sedangkan tingkat angka kemiskinan di Kabupaten Kediri selama enam tahun tahun terakhir bisa dilihat di tabel dibawah ini :

**Grafik 1.6**  
**Angka Kemiskinan Kabupaten Kediri**  
**Tahun 2016 - 2021**



Sumber : Data BPS Tahun 2021

## 1.5. REFORMASI BIROKRASI DAN INOVASI PELAYANAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri tahun 2005-2025, pada misi ke 2 menyatakan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Profesional dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Misi ini bermaksud membangun transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat serta peningkatan kinerja, efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintah dalam pelayanan publik didukung profesionalisme aparatur, stabilitas politik, ketentraman dan ketertiban. Pemerintah punya peran sangat strategis dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan daerah.



Misi tersebut kemudian diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri 2016-2021 pada misi ke-11, yaitu “Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Melanjutkan Reformasi Birokrasi”. Kemudian pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri 2021 – 2026 misi ke -2 yaitu “Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik”. Ketiga dasar hukum daerah tersebut kemudian menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk melakukan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik bagi masyarakat. Komitmen tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 57 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026, dan sesuai amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Meski pada kenyataannya, kegiatan reformasi birokrasi sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri sejak tahun 2010 melalui pengembangan berbagai aplikasi sistem. Tujuannya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Aplikasi sistem terdiri dari sistem perencanaan, penatausahaan keuangan sampai dengan sistem aplikasi untuk pelaksanaan pengawasan keuangan oleh inspektorat, serta aplikasi sistem online dalam pelayanan publik khususnya perijinan. Untuk perijinan ini sudah keluar Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Perijinan Satu Pintu sehingga mampu meningkatkan kecepatan pelayanan masyarakat yang terserah secara luas di 26 kecamatan Kabupaten Kediri.

Tabel 1.3  
Aplikasi Sistem Informasi

No	Nama Aplikasi Sistem	Tahun
1.	Pengembangan <i>website</i> (portal) Pemerintah Daerah	2009
2.	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)	2010
3.	Sistem Pengadaan Barang & Jasa Secara Elektronik (SPSE)	2011
4.	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP)	2012
5.	Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	2012
6.	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2012
7.	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	2013
8.	Sistem Aplikasi Absensi Jari Online (Siabjo)	2015
9.	Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA)	2016
10.	Sistem Informasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (Sitamsil)	2016
11.	Sistem Informasi Perencanaan Daerah (e-Planning)	2017
12.	Sistem Aplikasi e-kinerja v5	2020



13.	SIPD ( Sistem Informasi Pemerintah Daerah)	2021
14.	E-audit	2021
15.	Sahaja Online	2021

Sumber: Pemerintah Kabupaten Kediri.

Dalam upaya menuju tata kelola *electronic government (e-gov)*, maka Pemerintah Kabupaten Kediri, sebagaimana sudah tertuang dalam dokumen *road map* reformasi birokrasi, akan terus mengembangkan berbagai aplikasi sistem untuk mendukung kemudahan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan. Antara lain Sistem Aplikasi e-SAKIP dan e-Budgeting yang akan dikembangkan sejak Tahun 2018.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah Sistem Informasi Perencanaan Daerah (*e-Planning*) yang sudah diluncurkan sejak Tahun 2017.



Gambar 1.1 e-planning Pemerintah Kabupaten Kediri

Beberapa sistem aplikasi lain juga terus dikembangkan untuk mewujudkan profesionalitas ASN guna menunjang misi ke-11 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri 2016-2021. Antara lain adalah Siabjo atau Sistem Aplikasi Jari Online sejak tahun 2015 dan Sistem Aplikasi e-kinerja v5 yang sudah diperbarui pada Tahun 2020.



Gambar 1.2 Sistem Aplikasi e-Kinerja dan Siabjo



beberapa sistem aplikasi juga sudah berjalan sejak tahun 2012, antara lain sistem LPSE Online untuk pengadaan barang dan jasa <http://lpse.kedirikab.go.id/eproc>.



Gambar 1.3: LPSE Kabupaten Kediri

Pada tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kediri juga sudah menerapkan SIPD pada Tahun 2021, Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dan SIMBADA (Sistem Informasi Barang Milik Daerah). Aplikasi sistem ini meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.



Gambar 1.2: SIPD, SIMDA dan SIMBADA Kabupaten Kediri

Berbagai kerja keras Pemerintah Kabupaten Kediri beserta jajarannya tersebut akhirnya juga membuahkan hasil. Setidaknya, Kabupaten Kediri berhasil memperoleh beberapa prestasi dan penghargaan tingkat regional dan nasional atas berbagai prestasinya tersebut.



## 1.6. ORGANISASI DAN SUMBER DAYA APARATUR

Pemerintah Kabupaten Kediri telah membentuk Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, yaitu meliputi dapat menangani seluruh urusan pemerintahan/kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kediri telah membentuk Kelembagaan Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perangkat Daerah tersebut bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, dengan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, dan 3 asisten yaitu Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum.

Struktur jabatan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi: Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Hukum;
3. Asisten Adm. Perekonomian dan Pembangunan, membawahi: Bagian Perekonomian dan Bagian Adm. Pembangunan dan Layanan Pengadaan;
4. Asisten Administrasi Umum, membawahi: Bagian Umum dan Bagian Organisasi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Inspektorat.



- c. Sekretariat DPRD.
- d. Dinas-Dinas Daerah yaitu: Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMPD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPMPTSP, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika, DPKP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Satpol PP.
- e. Lembaga Teknis Daerah yaitu: Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Balitbangda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BPBD, Bakesbangpol.
- f. Rumah Sakit Daerah (RSUD) Pare.
- g. Rumah Sakit Daerah Simpang Lima Gumul/RSUD SLG.
- h. Kecamatan dan Kelurahan, yang terdiri dari 26 kecamatan dan 1 Kelurahan.
- i. Selain itu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri terdapat 4 perusahaan daerah yang tugas dan fungsinya melayani masyarakat sekaligus sebagai sumber keuangan daerah. 4 perusahaan daerah tersebut adalah :
  - 1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),
  - 2. PD BPR Bank Daerah
  - 3. PD Margo Mulyo
  - 4. PD Canda Bhirawa

Pengembangan kapasitas merupakan bagian penting di berbagai aspek kehidupan, salah satunya didalam instansi pemerintahan, pengembangan kapasitas penting untuk meningkatkan kemampuan atau menjadikan kinerja aparatur negara lebih baik dalam menjalankan tugasnya sebagai Abdi Negara. Berbagai bentuk pelatihan sebenarnya sudah banyak dilakukan baik untuk tingkat pejabat maupun staf, tetapi orientasi pelatihan lebih banyak pada peningkatan kapasitas intelektual dan belum pada perubahan *mindset* birokrasi. Begitu pentingnya pelatihan perubahan *mindset* birokrasi, sehingga menjadi salah satu area perubahan dalam program reformasi birokrasi. *Mind set* aparatur



birokrasi akan menjadi penentu bagi tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berkualitas dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima. Berdasarkan data dari BKD per 31 Desember 2021 Jumlah Total PNS Pemerintah Kabupaten Kediri sejumlah 8.796.

Tabel 1.4  
Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan

ASN	GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN										TOTAL		
		D-I	D-II	D-III	D-IV	S-1	S-2	S-3	SD	SLTA	SLTP			
PNS	I/a													0
	I/b								2					2
	I/c								9	1	1			11
	I/d								26		66			92
	II/a								10	5	39			54
	II/b	2	2								153	15		172
	II/c		28	237							151	9		425
	II/d	23	25	113		3					401	5		570
	III/a		62	177	31	1022					72			1364
	III/b	3	27	158	17	786	4				171			1166
	III/c	1	7	44	12	695	16				38			813
	III/d	21	22	202	17	914	57				55			1288
	IV/a	1	87	45	25	718	164				53			1093
	IV/b		78	13		1438	77	2			30			1638
	IV/c		3			79	23	2						107
	IV/d							1						1
	<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>341</b>	<b>989</b>	<b>102</b>	<b>5655</b>	<b>342</b>	<b>4</b>	<b>47</b>	<b>1130</b>	<b>135</b>		<b>8796</b>	
PPPK	V									14			14	
	VII			2									2	
	IX					149							149	
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	
<b>Grand Total</b>		<b>51</b>	<b>341</b>	<b>991</b>	<b>102</b>	<b>5804</b>	<b>342</b>	<b>4</b>	<b>47</b>	<b>1144</b>	<b>135</b>		<b>8961</b>	

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021

Data komposisi PNS Pemerintah Kabupaten Kediri di atas menunjukkan sebagian besar struktur PNS di Pemerintah Kabupaten Kediri adalah sudah bergelar sarjana (S1) yaitu sebanyak 5.655 orang (64,29%). Disusul kemudian dengan lulusan jenjang pendidikan tingkat SLTA sebanyak 1.130 orang (12,85%) baru kemudian untuk jenjang diploma yaitu D-III sebanyak 989 orang (11,24%) dan D-II sebanyak 341 orang (3,88%). Jumlah lulusan SLTA yang masih besar tersebut harus mulai dipikirkan untuk diberikan waktu dan kesempatan dalam melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa jenjang lulusan pendidikan sebaiknya minimal



Diploma-III, sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dapat berkembang dan melakukan inovasi dalam pemerintahan. Sementara untuk PNS yang bergelar S2 sebanyak 342 orang (3,89%).

Struktur PNS Pemerintah Kabupaten Kediri apabila dilihat dari komposisi Golongan Ruang, Eselon dan Non Eselon pada tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5  
Tabel Jumlah PNS berdasarkan Golongan Ruang, Eselon dan Non Eselon

GOL/RUANG	ESELON										NON ESELON							GRAND TOTAL	GOL/RUANG	PPPK	GRAND TOTAL	
	I		II		III		IV		V		Jumlah ESELON	Dir. PD, BPPK, Bank Daerah	Dir. PD/AM	Fungsional	MPP	Sekdes	Staf					Jumlah NON ESELON
	a	b	a	b	a	b	a	b	a													
Gol Ia											0							0	Gol I		0	
Gol Ib											0						2	2	Gol II		2	
Gol Ic											0						11	11	Gol III		11	
Gol Id											0						92	92	Gol IV		92	
Jumlah Gol I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	105			0	105	
Gol IIa											0			1	1	52	54	Gol V	14	68		
Gol IIb											0		13	1	158	172	Gol VI		172			
Gol IIc											0		7	30	388	425	Gol VII	2	427			
Gol IId											0		228	1	59	282	Gol VIII		570			
Jumlah Gol II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	2	90	860	1221		16	1237	
Gol IIIa											0			430		934	1364	Gol IX	149	1513		
Gol IIIb							12	1			13		872		281	1153	1166	Gol X		1166		
Gol IIIc						5	67	15			87		576		150	726	813	Gol XI		813		
Gol IIId					6	28	121	28	6		169		902	3	194	1099	1288	Gol XII		1288		
Jumlah Gol III	0	0	0	0	6	33	200	44	6	289	0	0	2780	3	0	1859	4342		149	4780		
Gol IVa					11	70	47	3			131		926		36	962	1093	Gol XIII		1093		
Gol IVb					5	38	9	1			53		1581		4	1585	1638	Gol XIV		1638		
Gol IVc				1	8						9		97	1		98	107	Gol XV		107		
Gol IVd											0		1			1	1	Gol XVI		1		
Jumlah Gol IV	0	0	1	13	49	79	48	0	0	193	0	0	2605	1	0	40	2646		0	2639		
Jumlah ASN	0	0	1	13	55	112	248	47	6	482	0	0	5634	6	90	2584	8314		165	8961		

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021

Komposisi struktur jabatan tersebut di atas cukup ideal di mana jumlah jabatan struktural sebanyak 482 orang atau sebesar 5,48% dan untuk komposisi non eselon sebanyak 8.979 atau sebesar 94,52%. Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan jumlah unit kerja yang ada sebanyak lebih dari 68 unit kerja, maka sebanyak 713 jabatan tersebut masih cukup sedikit atau dapat dikatakan struktur Pemerintah Daerah masih cukup ramping. Sehingga, diharapkan mampu bergerak cepat dan dinamis untuk merespon setiap perkembangan pelayanan publik.





## 1.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Sistematika penyajian Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

### i. KATA PENGANTAR

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan hal-hal umum tentang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021, serta penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi Pemerintah Kabupaten Kediri, yang terinci sebagai berikut:

- a. Latar Belakang;
- b. Dasar Hukum;
- c. Maksud dan Tujuan;
- d. Gambaran Umum Daerah;
- e. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan;
- f. Organisasi dan Sumber Daya Aparatur;
- g. Kerangka Penerapan SAKIP Kabupaten Kediri;
- h. Sistematika Penyajian.

#### BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Kediri dan dokumen rencana kinerja tahunan. Uraian meliputi gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih Pemerintah Kabupaten Kediri pada tahun 2021 serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi, yang terinci dalam:

- 2.1. Rencana Kinerja.
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
- 2.3. Ringkasan APBD Tahun 2021.



### BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Selain itu, dilaporkan pula realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja, yang terinci sebagai berikut:

4.1. Capaian Kinerja.

4.2. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini  
Dengan Target Akhir Periode RPJMD.

4.3. Alokasi per-Sasaran Pembangunan.

4.4. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.

4.5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan.

4.6. Realisasi Anggaran.

### BAB IV : PENUTUP

Pada bagian akhir ini mengemukakan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
- Prestasi Pemkab Kediri Tahun 2021.



## BAB 2

# PERENCANAAN KINERJA

## 2.1 RENCANA KINERJA

Sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah khususnya terkait dengan tata kelola pemerintah yang bersih, profesional, akuntabel dan transparan, maka Pemerintah Kabupaten Kediri membangun berbagai infrastruktur aplikasi sistem pendukung kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut. Penerapan aplikasi sistem informasi tersebut di mulai pada tahap/fase perencanaan pembangunan sampai dengan evaluasi kinerja. Penggunaan aplikasi sistem online ini selain ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja, juga untuk meningkatkan efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan juga pelayanan publik kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kediri menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2021 dengan mengacu pada indikator dan target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021. RKPD ini berisikan arah kebijakan dan program/kegiatan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan dan mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan beberapa perubahan yang diperlukan, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kabupaten Kediri 2016–2021 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016–2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016–2021 dan untuk pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan ditetapkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 24 tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021.

### **Bab 2 Berisi:**

- A. Rencana Kinerja
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Ringkasan APBD 2021



## 1. Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”**

## 2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan ajaran Agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmoni.
- 2) Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.
- 4) Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
- 5) Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan.
- 6) Menumbuhkembangkan kreativitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro.
- 7) Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.
- 8) Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan.
- 9) Mengoptimalkan pelayanan perijinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha.
- 10) Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan khususnya kaum perempuan.
- 11) Mewujudkan aparatur Pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi



- 12) Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang.
- 13) Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi.
- 14) Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang.
- 15) Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat.

### 3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan Pembangunan terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Matriks Hubungan Antara Misi dan Tujuan**

MISI		TUJUAN		INDIKATOR	
1	Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmoni	1	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	1	Jumlah kasus konflik berlatar belakang agama
2	Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan	1	Terwujudnya kemandirian menuju swasembada pangan melalui peningkatan produksi Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan	1	Nilai pola pangan harapan
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan	1	Meningkatkan kesejahteraan, ketentraman, ketertiban dan keamanan di	1	Angka kemiskinan



MISI		TUJUAN		INDIKATOR	
	dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman		masyarakat		
4	Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan	1	Meningkatkan kualitas pendidikan dengan biaya murah (terjangkau) serta meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan formal, non formal dan informal	1	Angka rata-rata lama sekolah
				2	APK
					- SD/MI
					- SMP/MTs
				3	APM
					- SD/MI
					- SMP/MTs
5	Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan	1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka usia harapan hidup
6	Menumbuhkembangkan kreativitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro	1	Mengembangkan kreativitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah	1	PDRB per kapita (juta rupiah)
				2	Angka pertumbuhan ekonomi
7	Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah	1	Mengembangkan industri pariwisata untuk mendorong kreativitas dan produktivitas memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah serta	1	PDRB ADHB (juta rupiah)



MISI		TUJUAN		INDIKATOR	
			meningkatkan daya saing perekonomian berbasis sistem inovasi daerah		
8	Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan	1	Meningkatkan keberlanjutan kerjasama antara koperasi, pemerintah dan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1	Persentase koperasi sehat
9	Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha	1	Meningkatnya iklim investasi	1	Persentase nilai investasi
10	Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan	1	Meningkatkan kualitas masyarakat menuju masyarakat partisipatif dengan pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan	1	CBR
				2	IPG
11	Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi	1	Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional	1	Indeks Reformasi Birokrasi



MISI		TUJUAN		INDIKATOR	
12	Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang	1	Mewujudkan pembangunan infrastruktur guna menunjang percepatan pembangunan	1	Persentase infrastruktur daerah dalam kondisi baik
13	Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi	1	Mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi	1	Jumlah ruang publik yang terlayani <i>free wifi</i>
14	Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang	1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
15	Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat	1	Memberdayakan tenaga kerja sehingga terampil dan berwawasan sebagai upaya menjadikan tenaga kerja yang bermartabat dan berdaya saing	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

#### 4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.2**  
**Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran**

TUJUAN				SASARAN				
URAIAN		INDIKATOR		URAIAN		INDIKATOR		
1	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama	1	Jumlah kasus konflik berlatar belakang agama	1	Meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1	Persentase penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti	
2	Terwujudnya kemandirian menuju swasembada pangan melalui peningkatan produksi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan	1	Nilai Pola Pangan Harapan	1	Meningkatnya kualitas sarana irigasi guna mendukung produksi dan produktivitas pertanian	1	Persentase panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik	
				2	Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	1	Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)	
				3	Meningkatnya produksi bahan pangan utama	1	Nilai produksi bahan pangan utama	
				4	Meningkatnya produksi hasil perkebunan	1	Nilai produksi perkebunan	
				5	Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan	1	Persentase peningkatan produksi peternakan	- Daging
								- Telur
- Susu								
2	Persentase peningkatan produksi perikanan							



TUJUAN				SASARAN			
URAIAN		INDIKATOR		URAIAN		INDIKATOR	
						- Kolam	
						- Perairan umum	
3	Meningkatkan kesejahteraan, ketentraman, ketertiban dan keamanan di masyarakat	1	Angka kemiskinan	1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	1	Persentase jumlah PMKS yang ditangani
				2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku	1	Persentase penurunan pelanggaran Perda/Perbup
				3	Meningkatnya koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pengurangan risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat	1	Jumlah Desa Tangguh Bencana
4	Meningkatkan kualitas pendidikan dengan biaya murah (terjangkau) serta meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan formal, non formal dan informal	1	Angka Rata-rata lama sekolah	1	Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan dan kualitas keluaran pendidikan	1	Angka harapan lama sekolah
				APK			
				SD/MI			
				SMP/MTs			
				APM			
				SD/MI			
SMP/MTs							
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka usia harapan hidup	1	Meningkatkan pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	1	Angka Kematian Ibu
						2	Angka Kematian Bayi
6	Mengembangkan kreativitas, produktivitas dan	1	PDRB per kapita (juta rupiah)	1	Meningkatnya sektor industri	1	Angka pertumbuhan industri



TUJUAN				SASARAN			
URAIAN		INDIKATOR		URAIAN		INDIKATOR	
	pendapatan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah	2	Angka pertumbuhan ekonomi				
7	Mengembangkan industri pariwisata untuk mendorong kreativitas dan produktivitas memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah serta meningkatkan daya saing perekonomian berbasis sistem inovasi daerah	1	PDRB ADHB (juta rupiah)	1	Mengembangkan industri pariwisata untuk memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah	1	Jumlah kunjungan wisata
						2	Persentase kelompok seni budaya yang diberdayakan
8	Meningkatkan keberlanjutan kerjasama antara koperasi, pemerintah dan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1	Persentase koperasi sehat	1	Meningkatnya Kualitas kelembagaan koperasi dan meningkatnya kesempatan berusaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1	Persentase koperasi aktif
						2	Persentase pertumbuhan usaha mikro
9	Meningkatnya iklim investasi	1	Persentase nilai investasi	1	Meningkatnya investasi di daerah	1	Nilai Realisasi Investasi (milyar rupiah)
10	Meningkatkan kualitas masyarakat menuju masyarakat partisipatif dengan pengendalian penduduk dan pemberdayaan	1	Crude Birth Rate (CBR)	1	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana	1	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana
		2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	2	Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)



TUJUAN				SASARAN			
URAIAN		INDIKATOR		URAIAN		INDIKATOR	
	perempuan			3	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	1	Persentase BUMDes yang aktif
						2	Jumlah desa tertinggal
11	Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang professional	1	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1	Nilai SAKIP
				2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	1	Hasil nilai IKM (Indeks kepuasan masyarakat)
				3	Meningkatnya profesionalitas ASN	1	Indeks Profesionalitas ASN
12	Mewujudkan pembangunan infrastruktur guna menunjang percepatan pembangunan	1	Persentase infrastruktur daerah dalam kondisi baik	1	Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	1	Persentase jalan dengan kondisi baik
						2	Persentase jembatan kabupaten dengan kondisi baik
						3	Persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak
						4	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh
				2	Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan
						2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana



TUJUAN				SASARAN			
URAIAN		INDIKATOR		URAIAN		INDIKATOR	
							keselamatan transportasi jalan
13	Mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi	1	Jumlah ruang publik yang terlayani <i>free wifi</i>	1	Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah	1	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah
14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1	Menurunnya beban pencemaran lingkungan	1	Persentase penurunan beban pencemaran lingkungan
				2	Meningkatnya penataan dan pemanfaatan kawasan daerah sesuai rencana tata ruang	2	Angka luasan RTH KP publik terbangun di wilayah perkotaan
15	Memberdayakan tenaga kerja sehingga terampil dan berwawasan sebagai upaya menjadikan tenaga kerja yang bermartabat dan berdaya saing	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	1	Persentase Tingkat Partisipasi angkatan kerja
				2	Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	2	Persentase peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma jamsostek

5. Rencana Kinerja Tujuan

TUJUAN				
TUJUAN		INDIKATOR		TARGET
1	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	1	Jumlah kasus konflik berlatar belakang agama	100%
2	Terwujudnya kemandirian menuju swasembada pangan melalui peningkatan produksi Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan	1	Nilai Pola Pangan Harapan	90,4



TUJUAN				
TUJUAN		INDIKATOR		TARGET
3	Meningkatkan kesejahteraan, ketentraman, ketertiban dan keamanan di masyarakat	1	Angka kemiskinan	11,52
4	Meningkatkan kualitas pendidikan dengan biaya murah (terjangkau) serta meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan formal, non formal dan informal	1	Angka Rata-rata lama sekolah	8,43
			APK	
			SD/MI	109,90
			SMP/MTs	99,83
			APM	
			SD/MI	99,95
			SMP/MTs	80,25
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka usia harapan hidup	72,68
6	Mengembangkan kreativitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah	1	PDRB per kapita (juta rupiah)	21,13
		2	Angka pertumbuhan ekonomi	5,91
7	Mengembangkan industri pariwisata untuk mendorong kreativitas dan produktivitas memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah serta meningkatkan daya saing perekonomian berbasis sistem inovasi daerah	1	PDRB ADHB (juta rupiah)	53.477. 278,68
8	Meningkatkan keberlanjutan kerjasama antara koperasi, pemerintah dan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1	Persentase koperasi sehat	87,60
9	Meningkatnya iklim investasi	1	Persentase nilai investasi	3
10	Meningkatkan kualitas masyarakat menuju masyarakat partisipatif dengan pengendalian penduduk dan	1	Crude Birth Rate (CBR)	14, 84
		2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,24



TUJUAN				
TUJUAN		INDIKATOR		TARGET
	pemberdayaan perempuan			
11	Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional	1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC
12	Mewujudkan pembangunan infrastruktur guna menunjang percepatan pembangunan	1	Persentase infrastruktur daerah dalam kondisi baik	95
13	Mengembangkan Jaringan komunikasi dan informasi	1	Jumlah ruang publik yang terlayani <i>free wifi</i>	100
14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65
15	Memberdayakan tenaga kerja sehingga terampil dan berwawasan sebagai upaya menjadikan tenaga kerja yang bermartabat dan berdaya saing	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,64

#### 6. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada Program hingga perlu dioperasionalkan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada Kegiatan dan Sub Kegiatan, namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan.

RKPD yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dirancang untuk Pemerintah Daerah, di Kabupaten Kediri telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021.

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Adapun Rencana Kinerja Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		TARGET	
1	Meningkatkan kualitas Kehidupan beragama	1	Meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1	Persentase penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti	100	
2	Terwujudnya kemandirian menuju swasembada pangan melalui peningkatan produksi pertanian, peternakan, perikanan, erkebunan	1	Meningkatnya kualitas sarana irigasi guna mendukung produksi dan produktivitas pertanian	1	Persentase panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik	82	
		2	Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	1	Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)	141,80	
		3	Meningkatnya produksi bahan pangan utama	1	Nilai produksi bahan pangan utama	826.000	
		4	Meningkatnya produksi hasil perkebunan	1	Nilai produksi perkebunan	239.480	
		5	Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan	1	Persentase peningkatan produksi peternakan	- Daging	0,73
						- Telur	0,95
						- Susu	4
				2	Persentase peningkatan produksi perikanan		



TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		TARGET
					- Kolam	4,5
					- Perairan umum	4
3	Meningkatkan kesejahteraan, ketentraman, ketertiban dan keamanan di masyarakat	1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan social	1	Persentase jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani	23,29
		2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku	1	Persentase penurunan pelanggaran Perda/Perbup	95
		3	Meningkatnya koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pengurangan risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat	1	Jumlah Desa Tangguh Bencana	10
4	Meningkatkan kualitas pendidikan dengan biaya murah (terjangkau) serta meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan formal, non formal dan informal	1	Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan dan kualitas keluaran pendidikan	1	Angka harapan lama sekolah	13,65
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Meningkatkan pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	1	Angka Kematian Ibu	41,64
				2	Angka Kematian Bayi	6,87



TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		TARGET
6	Mengembangkan kreativitas, produktivitas Dan pendapatan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah	1	Meningkatnya sektor industry	1	Angka pertumbuhan industri	3.550
7	Mengembangkan industri pariwisata untuk mendorong kreativitas dan produktivitas memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah serta meningkatkan daya saing perekonomian berbasis sistem inovasi daerah	1	Mengembangkan industri pariwisata untuk memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah	1	Jumlah kunjungan wisata	2.680.440 <b>112.000*</b> <b>(*perubahan target)</b>
				2	Persentase kelompok seni budaya yang diberdayakan	52,50 % <b>10.00*</b> <b>(*perubahan target)</b>
8	Meningkatkan keberlanjutan kerjasama antara koperasi, pemerintah dan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatnya Kualitas kelembagaan koperasi dan meningkatnya kesempatan berusaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1	Persentase koperasi aktif	71
				2	Persentase pertumbuhan usaha mikro	3,39
9	Meningkatnya iklim investasi	1	Meningkatnya investasi di daerah	1	Nilai Realisasi Investasi (milyar rupiah)	Rp.533.365637
10	Meningkatkan kualitas masyarakat menuju masyarakat partisipatif dengan pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan	1	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana	1	Prevalensi peserta KB aktif	72,50
		1	Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,39



TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		TARGET
			pembangunan			
		1	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	1	Persentase BUMDes yang aktif	13,9
				2	Jumlah desa tertinggal	103
11	Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional	1	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1	Nilai SAKIP	A
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	2	Hasil nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85
		3	Meningkatnya profesionalitas ASN	3	Indeks Profesionalitas ASN	86
12	Mewujudkan pembangunan infrastruktur guna menunjang percepatan pembangunan	1	Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	1	Persentase jalan dengan kondisi baik	95
				2	Persentase jembatan kabupaten dengan kondisi baik	89,5
				3	Persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	95
				4	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	0
		2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	77
				2	Persentase pemenuhan	88,50



TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		TARGET
					sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan	
13	Mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi	1	Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah	1	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah	4
14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Menurunnya beban pencemaran lingkungan	1	Persentase penurunan beban pencemaran lingkungan	4
		2	Meningkatnya penataan dan pemanfaatan kawasan daerah sesuai rencana tata ruang	2	Angka luasan RTH KP publik terbangun di wilayah perkotaan	9,902
15	Memberdayakan tenaga kerja sehingga terampil dan berwawasan sebagai upaya menjadikan tenaga kerja yang bermartabat dan berdaya saing	1	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	1	Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja	67
		2	Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	2	Persentase peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma Jamsostek	24

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN KEDIRI 2021

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sehingga terwujud komitmen penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun komponen perjanjian kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021 sebagai berikut :



**Misi 1** : Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni

**Tujuan 1** : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Persentase penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti	100

**Misi 2** : Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan

**Tujuan 1** : Terwujudnya kemandirian menuju swasembada pangan melalui peningkatan produksi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatkan kualitas sarana irigasi guna mendukung produksi dan produktivitas pertanian	1 Persentase panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik	82
2. Meningkatkan ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	1 Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)	141,80
3. Meningkatkan produksi bahan pangan utama	1 Nilai produksi bahan pangan utama	826.000
4. Meningkatkan produksi hasil perkebunan	1 Nilai produksi perkebunan	239.480
5. Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan	1 Persentase peningkatan produksi peternakan	
	- Daging	0,73
	- Telur	0,95
	- Susu	4
	2 Persentase peningkatan produksi perikanan	
	- Kolam	4,5
- Perairan umum	4	



**Misi 3** : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman

**Tujuan 3** : Meningkatkan kesejahteraan, ketentraman, ketertiban dan keamanan di masyarakat.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Persentase jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ditangani	23,29
2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku	Persentase penurunan pelanggaran Perda/Perbup	95
3. Meningkatnya koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pengurangan risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Desa Tangguh Bencana	10

**Misi 4** : Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan

**Tujuan 4** : Meningkatkan kualitas pendidikan dengan biaya murah (terjangkau) serta meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan formal, non formal dan informal

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan dan kualitas keluaran pendidikan	1. Angka harapan lama sekolah	13,65

**Misi 5** : Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan.

**Tujuan 5** : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatkan pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	1. Angka Kematian Ibu	41,64
	2. Angka Kematian Bayi	6,87



**Misi 6** : Menumbuhkembangkan kreativitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro

**Tujuan 6** : Mengembangkan kreativitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya sektor industry	Angka pertumbuhan industri	3.550

**Misi 7** : Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.

**Tujuan 7** : Mengembangkan industri pariwisata untuk mendorong kreativitas dan produktivitas memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah serta meningkatkan daya saing perekonomian berbasis sistem inovasi daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Mengembangkan industri pariwisata untuk memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah	1. Jumlah kunjungan wisata	2.680.440 <b>112.000*</b> (*perubahan target)
	2. Persentase kelompok seni budaya yang diberdayakan	52,50 % <b>10.00*</b> (*perubahan target)

**Misi 8** : Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan

**Tujuan 8** : Meningkatkan keberlanjutan kerjasama antara koperasi, pemerintah dan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan meningkatnya kesempatan berusaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Persentase koperasi aktif	71
	2. Persentase pertumbuhan usaha mikro	3,39



**Misi 9** : Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha

**Tujuan 9** : Meningkatkan iklim investasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya investasi di daerah	Nilai Realisasi Investasi (milyar rupiah)	Rp.533.365637

**Misi 10** : Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan

**Tujuan 10** : Meningkatkan kualitas masyarakat menuju masyarakat partisipatif dengan pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana	Prevalensi peserta KB aktif	72,5
2. Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,39
3. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	1. Persentase BUMDes yang aktif	13,9
	2. Jumlah desa tertinggal	103

**Misi 11** : Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi

**Tujuan 11** : Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	A
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Hasil nilai IKM (Indeks kepuasan masyarakat)	85
3. Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	86



**Misi 12** : Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang.

**Tujuan 12** : Mewujudkan pembangunan infrastruktur guna menunjang percepatan pembangunan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	1. Persentase jalan dengan kondisi baik	95
	2. Persentase jembatan kabupaten dengan kondisi baik	89,5
	3. Persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	95
	4. Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	0
2. Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	77
	2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan	88,50

**Misi 13** : Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi

**Tujuan 13** : Mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah	4

**Misi 14** : Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang

**Tujuan 14** : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Menurunnya beban pencemaran lingkungan	1. Persentase penurunan beban pencemaran lingkungan	4
2. Meningkatnya penataan dan pemanfaatan kawasan daerah sesuai rencana tata ruang	2. Angka luasan RTH KP publik terbangun di wilayah perkotaan	9,902 Ha



**Misi 15** : Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat

**Tujuan 15** : Memberdayakan tenaga kerja sehingga terampil dan berwawasan sebagai upaya menjadikan tenaga kerja yang bermartabat dan berdaya saing

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	1. Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja	67
2. Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	2. Persentase Peningkatan Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Jamsostek	24



## 2.3 RINGKASAN APBD TAHUN 2021

Dukungan penyediaan dana atau anggaran untuk penyelenggaraan pemerintah agar dapat menangani seluruh urusan pemerintah/kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2021 dengan ringkasan sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Ringkasan APBD Tahun 2021**

Uraian		Anggaran (Rp)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	2.764.954.775.390,97
<b>A.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	456.360.001.365,60
A.1.1	Pajak Daerah	197.645.000.000,00
A.1.2	Retribusi Daerah	23.421.020.250,00
A.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.781.939.684,60
A.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	225.512.041.431,00
<b>A.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	2.287.679.467.415,37
A.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.128.113.379.504,00
A.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	159.566.087.911,37
<b>A.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	20.915.306.610,00
A.3.1	Pendapatan Hibah	20.915.306.610,00
A.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
<b>B.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	3.337.191.772.924,30
<b>B.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	2.287.623.155.013,38
B.1.1	Belanja Pegawai	1.115.627.883.149,33
B.1.2	Belanja Barang dan Jasa	916.725.120.544,05
B.1.3	Belanja Hibah	150.425.147.100,00
B.1.4	Belanja Bantuan Sosial	104.845.004.220,00



Uraian		Anggaran (Rp)
<b>B.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	379.419.911.387,92
B.2.1	Belanja Modal Tanah	1.503.750.000,00
B.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.660.420.966,93
B.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.364.772.832,00
B.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	138.294.864.775,00
B.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.596.102.813,99
<b>B.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	79.426.511.523,00
B.3.1	Belanja Tidak Terduga	79.426.511.523,00
<b>B.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	590.722.195.000,00
B.4.1	Belanja Bagi Hasil	23.885.042.000,00
B.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	566.837.153.000,00
	<b>SURPLUS/ DEFISIT</b>	572.236.997.533,33
<b>C.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	577.236.997.533,33
C.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	567.686.997.533,33
C.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	9.550.000.000,00
<b>C.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	5.000.000.000,00
C.2.1	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	572.236.997.533,33
	<b>SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00

**BAB  
3****AKUNTABILITAS KINERJA**

**A**kuntabilitas kinerja sendiri merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periode.

Komitmen pemerintah pusat terhadap kinerja dirumuskan dalam bentuk penerapan anggaran dan sekaligus manajemen berbasis kinerja. Hal ini mengandung makna bahwa capaian kinerja pemerintahan diukur dengan indikator dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPRD, yaitu target kinerja yang ada di dalam RPJMD yang telah direvisi dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri. Dalam konteks perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, maka manajemen kinerja yang dimaksud adalah membandingkan antara capaian kinerja dengan perencanaan kinerja yang sudah dilaksanakan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, secara tegas dinyatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah membandingkan antara sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasi kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk tahun 2021 ini merupakan tahun kelima (5) dalam RPJMD 2016 – 2021.



### 3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam upaya pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri yang perlu dilakukan adalah dengan melalui pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja. Untuk mengetahui tingkat prosentase pencapaian masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Untuk menghitung capaian indikator kinerja sasaran dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk menentukan kategori capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri maka digunakan skala capaian sebagai berikut :

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	85 keatas	Sangat Berhasil
2	$70 \leq X < 85$	Berhasil
3	$55 \leq X < 70$	Cukup Berhasil
4	$X < 55$	Kurang Berhasil

Metode pengukuran kinerja setiap sasaran menggunakan metode dengan tahapan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya;
3. Analisa penyebab peningkatan / penurunan , serta solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan membandingkan capaian kinerja terhadap realisasi anggaran;



5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Untuk mengetahui capaian kinerja tahun 2021 pada bab ini dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi sebagai berikut:

**TABEL 3.1**  
**REALISASI INDIKATOR TUJUAN TAHUN 2016 - 2021**

TUJUAN				TARGET	REALISASI						CAPAIAN
URAIAN		INDIKATOR		AKHIR RPJMD ( 2021 )	2016	2017	2018	2019	2020	2021	AKHIR RPJMD 2021
1	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama	1	Jumlah kasus konflik berlatar belakang agama	0	0	0	0	0	0	0	100
2	Terwujudnya kemandirian menuju swasembada pangan melalui peningkatan produksi Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan	1	Nilai Pola Pangan Harapan	90,4	87,90	88,10	88,70	98,30	94,00	91,50	101,22
3	Meningkatkan kesejahteraan, ketentraman, ketertiban dan keamanan di masyarakat	1	Angka kemiskinan	11,52	12,72	12,25	11,31	10,42	11,40	11,64	101,04



TUJUAN		INDIKATOR	TARGET	REALISASI						CAPAIAN AKHIR RPJMD 2021		
URAIAN	AKHIR RPJMD ( 2021 )		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
4	Meningkatkan kualitas pendidikan dengan biaya murah (terjangkau) serta meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan formal, non formal dan informal	1	Angka Rata-rata lama sekolah	8,43	7,58	7,65	7,68	8,01	8,02	98,08	95,85	
			A P K									
			SD/MI	109,90	109,7 2	108,7	107,7 6	108,0 7	106,5	108,85	99,04	
			SMP/MTs	99,83	101,6 6	103,1	100,9 5	100,2	102,63	108,14	108,32	
			A P M									
			SD/MI	99,95	99,76	98,88	98,76	99,71	99,79	99,86	99,91	
			SMP/MTs	80,25	78,81	81,75	80,53	81,86	88,57	89,24	111,20	
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka usia harapan hidup saat lahir	72,68	72,2	72,25	72,37	72,54	72,61	72,65	99,96	
6	Mengembangkan Kreativitas, Produktivitas Dan Pendapatan Masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah	1	PDRB per kapita (juta rupiah)	21,13	21,36	22,92	24,61	26,16	25,71	25,96	122,85	
	2	Angka pertumbuhan ekonomi	5,91	5,02	5,90	5,07	5,06	-2,41	3,06	51,77		



TUJUAN				TARGET	REALISASI						CAPAIAN
URAIAN		INDIKATOR		AKHIR RPJMD ( 2021 )	2016	2017	2018	2019	2020	2021	AKHIR RPJMD 2021
7	Mengembangkan industri pariwisata untuk mendorong kreativitas dan produktivitas memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah serta meningkatkan daya saing perekonomian berbasis sistem inovasi daerah	1	PDRB ADHB (juta rupiah)	53.477. 278,68	33.21 1.390	35.78 9.540	38.58 8.230	41.18 3.680	40.626. 770	42.690,4 7	79,82
8	Meningkatkan keberlanjutan kerjasama antara koperasi, pemerintah dan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1	Persentase koperasi sehat	87,60	88,33	87,57	100	100	100	100	114,16
9	Meningkatnya iklim investasi	1	Persentase nilai investasi	3	27,79	14,43	2,24	80,04	11,15	37,55*	1251,67



TUJUAN				TARGET	REALISASI						CAPAIAN
URAIAN		INDIKATOR		AKHIR RPJMD ( 2021 )	2016	2017	2018	2019	2020	2021	AKHIR RPJMD 2021
10	Meningkatkan kualitas masyarakat	1	Crude Birth Rate (CBR)	14,84	17,7	17,3	17	16,8	15,99	12,53	84,43
	menuju masyarakat partisipatif dengan pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan	2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,24	91,99	92,81	91,81	92,7	92,7	92,7	100,50
11	Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang professional	1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	-	-	CC (57,98)	B (60,47)	B (61,03)	B	
12	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur guna menunjang Percepatan Pembangunan	1	Prosentase infrastruktur daerah dalam kondisi baik	95	-	-	84,54	84,99	84,12	83,5	87,89
13	Mengembangkan Jaringan Komunikasi dan Informasi	1	Jumlah ruang publik yang terlayani free wifi	100	-	10	20	20	20	89	89



TUJUAN				TARGET AKHIR RPJMD ( 2021 )	REALISASI						CAPAIAN AKHIR RPJMD 2021
URAIAN		INDIKATOR			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65	-	64,52	64,7	64,27	63,10	62,84	96,68
15	Memberdayakan tenaga kerja sehingga terampil dan berwawasan sebagai upaya menjadikan tenaga kerja yang bermartabat dan berdayasaing	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,64	4,95	3,18	4,25	4,83	5,24	5,15	90,01



TABEL 3.2

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

## PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 (TARGET AKHIR RPJMD)

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2021)	Realisasi			Capaian 2021	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD (%)
			2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Prosentase penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100
2.	Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)	141,80	153,40	153,60	144,58	101,96	101,96
3.	Nilai produksi bahan pangan utama	826.000	804.426	808.539	809,536	98,01	98,01
4.	Prosentase peningkatan produksi peternakan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daging</li> <li>• Telur</li> <li>• Susu</li> </ul>	0,73 0,95 4	4,91 0,84 3,61	-3,96 -14,79 -0,51	11,61 -12,14 0,59	1.590,41 - 14,75	1.590,41 - 14,75
5.	Prosentase peningkatan produksi perikanan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolam</li> <li>• Perairan Umum</li> </ul>	4,5 4	8,13 3,96	6,07 4,89	4,5 2,65	100 61,25	100 61,25
6.	Angka Harapan Lama Sekolah	13,65	12,87	13,15	13,44	98,46	98,46
7.	Angka kematian ibu (/100.000 kelahiran)	41,64	58,29	83,82	138,46	100	100
8.	Angka kematian bayi (/1000 kelahiran)	6,87	6,5	7,1	7,16	100	6,87
9.	Angka pertumbuhan industry	3.550	3.343	3.349	3,702	104,8	104,8
10.	Jumlah kunjungan wisata	2.680.440	4.186.008	908.907	520.998	19,43	19,43
11.	Prosentase koperasi aktif	71	53,76	55,52	54,79	77,17	77,17



No.	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2021)	Realisasi			Capaian 2021	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD (%)
			2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12.	Prosentase pertumbuhan usaha mikro	3,39	11,27	3,37	7,33	216,22	216,22
13.	Nilai realisasi investasi (milyar rupiah)*	Rp.533,36	Rp. 2.637,14	Rp.636,1 42150	2,476,06	366,70	366,70
14.	Indeks pemberdayaan Gender (IPG)	92,24	74,61	72,24	92,7	100,50	100,50
15.	Nilai SAKIP	A	B	B	B	-	-
16.	Hasil nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85	84	84	84,23	99,09	99,09
17.	Prosentase jalan dengan kondisi baik	95	88,86	86,94	88,63	93,29	93,29
18.	Prosentase jembatan Kabupaten dengan kondisi baik	89,5	81,12	81,29	78,37	87,56	87,56
19.	Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan	88,50	99,4	106,12	119,94	135,52	135,52
20.	Prosentase penurunan beban pencemaran lingkungan	4	7,62	17,49	5,02	125,5	125,5
21.	Prosentase tingkat partisipasi angkatan kerja	67	71,61	70,65	69,34	103,5	103,5

**Kategori penilaian IKU**

NO	Interval Nilai Capaian IKU	KATEGORI CAPAIAN
1	100 keatas	Sangat Baik
2	$80 \leq X < 100$	Baik
3	$60 \leq X < 80$	Cukup Baik
4	$X < 60$	Kurang Baik

Dari 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2018 kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa terdapat 11 (sebelas) IKU dengan kriteria **sangat baik**, dan 10 (sepuluh) IKU dengan kriteria **baik**.

Mayoritas dari 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri yang telah berhasil dicapai dengan kriteria **sangat baik** (50%) dan yang kriteria **baik** (50%).



TABEL 3.3

## PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021

No.	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Sasaran : Meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Jumlah kasus konflik berlatar belakang agama Prosentase penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti	0 100	0 100	100 100
2.	Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan	Tujuan : Terwujudnya kemandirian menuju swasembada pangan melalui peningkatan produksi Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan	Nilai Pola Pangan Harapan	90,4	91,50	101.22



No.	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Sasaran 1: Meningkatnya kualitas sarana irigasi guna mendukung produksi dan produktivitas pertanian	Prosentase panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik	82	76,61	93,43
		Sasaran 2: Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)	141,80	144,58	101,96
		Sasaran 3: Meningkatnya produksi bahan pangan utama	Nilai produksi bahan pangan utama	826.000 (ton)	809.536	98,01
		Sasaran 4: Meningkatnya produksi hasil perkebunan	Nilai produksi perkebunan	239.480 (ton)	239.642	100,07
		Sasaran 5: Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan	Prosentase peningkatan produksi peternakan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daging</li> <li>• Telur</li> <li>• Susu</li> </ul>	0,73 0,95 4	11,61 -12,14 0,59	1589,84 - 14,67



No.	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Prosentase peningkatan produksi perikanan <ul style="list-style-type: none"><li>• Kolam</li><li>• Perairan Umum</li></ul>	4,5 4	4,5 2,45	100 61,25
3.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan, ketentraman, ketertiban dan keamanan di masyarakat	Angka kemiskinan	11,52	11,46	105,20
		Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Prosentase jumlah PMKS yang ditangani	23,29	85,41	366,72
		Sasaran 2: Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku	Prosentase penurunan pelanggaran Perda / Perbup	95	-213	-224
		Sasaran 3: Meningkatnya koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pengurangan resiko bencana dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Desa Tangguh Bencana	10	8	80



No.	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
4.	Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan	Tujuan : Meningkatkan kualitas pendidikan dengan biaya murah (terjangkau) serta meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan formal, non formal dan informal	Angka Rata-rata lama sekolah	8,43	8,08	95,85	
			APK				
			-SD/MI	109,90	108,85	99,04	
			-SMP/MTs	99,83	108,14	108,32	
			APM				
			-SD/MI	99,95	99,86	99,91	
			-SMP/MTs	80,25	89,24	111,20	
		Sasaran : Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan dan kualitas keluaran pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,65	13,44	98,46	
5.	Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan	Tujuan : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	72,68	72,65	99,96	
			Sasaran : Meningkatnya pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	1. Angka Kematian Ibu	41,64	138,46	100
			2. Angka Kematian Bayi	6,87	7,16	100	



No.	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	Menumbuhkembangkan kreativitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro	Tujuan : Mengembangkan Kreativitas, Produktivitas Dan Pendapatan Masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah	1. PDRB per kapita (juta rupiah)	21,13	25,96	122,86
		Sasaran : Meningkatnya sektor industri	2. Angka pertumbuhan ekonomi	5,91	3,06	51,78
			Angka pertumbuhan industri	3.550 *Industri Kecil Menengah	3.702	104,8
7.	Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah	Tujuan : Mengembangkan industri pariwisata untuk mendorong kreativitas dan produktivitas memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah serta meningkatkan daya saing perekonomian berbasis sistem inovasi daerah	PDRB ADHB (juta rupiah)	53.477.278,68	42.690.470	
		Sasaran : Mengembangkan industri pariwisata untuk memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah	1. Jumlah kunjungan wisata	2.680.440	520.998	19,43
			2. Prosentase kelompok seni budaya yang diberdayakan	52,50 %	10,74	20,45



No.	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan	Tujuan : Meningkatkan keberlanjutan kerjasama antara koperasi, pemerintah dan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Persentase koperasi sehat	87,60	100	114,16
		Sasaran : Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan meningkatnya kesempatan berusaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Prosentase koperasi aktif	71	54,79	77,17
			2. Prosentase pertumbuhan usaha mikro	3,39	7,33	216,22
9.	Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha	Tujuan : Meningkatnya iklim investasi	Persentase nilai investasi	3	37,55	1.251,67
		Sasaran : Meningkatnya investasi di daerah	Nilai realisasi investasi (milyar rupiah)	533,365637	2.476,069	366,70
10.	Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan	Tujuan : Meningkatkan kualitas masyarakat menuju masyarakat partisipatif dengan pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan	1. CBR	15,34	12,53	118,32
			2. IPG	92,24	92,7	100,50



No.	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Sasaran 1: Meningkatnya pelayanan keluarga berencana	Prevalensi peserta KB aktif	72,5	70,77	97,61
		Sasaran 2: Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,39	72,24	97,11
		Sasaran 3: Meningkatnya Keberdayaan masyarakat perdesaan	1. Prosentase BUMDes yang aktif	13,9	76,38	549
			2. Jumlah desa tertinggal	103 Desa	0 *(sudah tidak ada desa dengan status desa tertinggal)	➤ 100
11.	Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi	Tujuan : Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	-
		Sasaran 1: Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	A	B	-



No.	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Hasil nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85	84,23	99,09
		Sasaran 3: Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	86	54,41	63
12.	Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang	Tujuan 12 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur guna menunjang Percepatan Pembangunan	Persentase infrastruktur daerah dalam kondisi baik	95	83,5	87,89
		Sasaran 1 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Prosentase jalan dengan kondisi baik	95	88,63	93,29
			Prosentase jembatan Kabupaten dengan kondisi baik	89,5	78,37	87,56
			Prosentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	95	84,59	89,04
			Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	0	72,63	125,74



No.	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Sasaran 2: Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	77	84,15	109,28
			Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan	88,50	119,94	135,52
13.	Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi	Tujuan : Mengembangkan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah ruang publik yang terlayani free wifi	100	51	51
		Sasaran : Meningkatnya sistem informasi pemerintah daerah	Jumlah sistem informasi pemerintah daerah	4	22	550
14.	Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang	Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65	62,84	96,68
		Sasaran 1: Menurunnya beban pencemaran lingkungan	Prosentase penurunan beban pencemaran lingkungan	4	5,02	125,5



No.	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Sasaran 2: Meningkatnya penataan dan pemanfaatan kawasan daerah sesuai rencana tata ruang	Angka luasan RTH KP publik terbangun di wilayah perkotaan	9,902 ( Ha )	14,745	148,91
15.	Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat	Tujuan : Memberdayakan tenaga kerja sehingga terampil dan berwawasan sebagai upaya menjadikan tenaga kerja yang bermartabat dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,64	5,15	90,01
		Sasaran 1: Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Prosentase tingkat partisipasi angkatan kerja	67	69,34	103,5
		Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	Prosentase peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma jamsostek	24	24,01	100,04



**TABEL 3.4**  
**PENGUKURAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA**  
**( TAHUN 2019 S/D. 2021 )**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
1.	Meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Prosentase penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya kualitas sarana irigasi guna mendukung produksi dan produktivitas pertanian	Prosentase panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik	79,25	75,68	95,49	80,50	73,24	90,98	82	76,61	93,43



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
3.	Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)	139,01	153,40	110,35	140,40	153,60	109,40	141,80	144,58	101,96
4.	Meningkatnya produksi bahan pangan utama	Nilai produksi bahan pangan utama (ton)	822.200	804.426	97,86	824.500	808.539	98,06	826.000	809.536	98,01
5.	Meningkatnya produksi hasil perkebunan	Nilai produksi perkebunan	239.270	215.640	90,12	239.380	239.629	100,10	239.480	239.642	100,07
6.	Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan	Prosentase peningkatan produksi peternakan									
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daging</li> <li>• Telur</li> <li>• Susu</li> </ul>	0,78	4,91	629,04	0,65	-3,96	-609,23	0,73	11,61	1589,84
		Prosentase peningkatan produksi perikanan									
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolam</li> <li>• Perairan Umum</li> </ul>	16,05	8,13	50,65	5,49	6,07	110,56	4,5	4,5	100
			4	3,96	99	5	4,89	97,80	4	2,45	61,25



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
7.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Prosentase jumlah PMKS yang ditangani	22,18	51,62	232,73	22,73	40,40	177,74	23,29	85,41	366,72
8.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku	Prosentase penurunan pelanggaran Perda/Perbup	90	60,23	66,92	90	60,23	66,92	95	-213	-224
9.	Meningkatnya koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pengurangan resiko bencana dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Desa Tangguh Bencana	6 Desa	6 desa	100	6 Desa	6 desa	100	10 Desa	8 Desa	80



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
10.	Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan dan kualitas keluaran pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,21	12,87	97,43	13,21	12,87	97,43	13,65	13,44	98,46
11.	Meningkatnya pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Angka kematian ibu	58,3	58,29	100	58,3	58,29	100	41,64	138,46	136,14
		Angka kematian bayi	7,29	6,5	112	7,29	6,5	112	6,87	7,16	7,12
12.	Meningkatnya sektor industri	Angka pertumbuhan industri	3.450	3.343	96,89	3.500	3.349	95,68	3.500 unit	3.702	105,17
13.	Mengembangkan industri pariwisata untuk memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah	Jumlah kunjungan wisata	2.198.352	4.186.008	190,42	975.444	908.907	93,18	2.680.440 112.000* (*perubahan target)	520.998	427,05
		Prosentase kelompok seni budaya yang diberdayakan	47,50	51,65	108,74	15	14,33	95,54	52,50 10,00* (*perubahan target)	10,74	107,45



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
14.	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan meningkatnya kesempatan berusaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Prosentase koperasi aktif	70	53,76	76,80	70,5	55,52	78,75	71	54,79	77,17
		Prosentase pertumbuhan usaha mikro	2,48	11,27	332,45	2,93	3,37	115,02	3,39	7,33	216,22
15.	Meningkatnya investasi di daerah	Nilai realisasi investasi (milyar rupiah)	502.748.267	2.637,14	524,55	517,830715	636,142150	122,85	533.365.637	1.955.859.674	366,70
16.	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana	Prevalensi peserta KB aktif	71,94	72,7	101,06	72,22	72,28	100,08	72,5	70,77	97,61
17.	Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	Indeks pemberdayaan Gender (IPG)	74,29	74,61	100,43	72,34	72,24	99,96	74,39	72,24	97,11



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
18.	Meningkatnya Keberdayaan masyarakat perdesaan	Prosentase BUMDes yang aktif	9,3 (32 desa)	19,2 (66 desa)	206,45	11,6	11,9	100	13,9	76,38	549
		Jumlah desa tertinggal	107 Desa	103 Desa	103,9	105	0	100	103 Desa	0* *(sudah tidak ada desa dengan status desa tertinggal)	➤ 100
19.	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	BB	B	-	BB	B	B	A	B	-
20.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Hasil nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85	84	98,82	85	82,20	96,70	85	84,29	99,09
21.	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	82	82,3	100%	84	82,4	98	86	54,41	63
22.	Meningkatnya sarana	Prosentase jalan dengan kondisi	92,50	88,86	96,06	93	86,94	93,48	95	88,63	93,29



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
	infrastruktur daerah	baik									
		Prosentase jembatan Kabupaten dengan kondisi baik	84,50	81,12	96	86	81,29	94,52	89,5	78,37	87,56
		Prosentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	85	83,26	97,95	90	18,89	0,21	95	74,15	78,05
		Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	30	100	333,3	20	1,18	5,90	0	72,63	125,74
23.	Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	76	82,01	107,91	76,50	83,82	109,57	77	84,15	109,28
		Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan	87,46	99,4	113,65	88,11	106,12	120,44	88,50	119,94	135,52



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
24.	Meningkatnya sistem informasi pemerintah daerah	Jumlah sistem informasi pemerintah daerah	4	14	350	4	14	350	4	22	550
25.	Menurunnya beban pencemaran lingkungan	Prosentase penurunan beban pencemaran lingkungan	3	7,62	254	4	17,49	254	4	5,02%	125,5
26.	Meningkatnya penataan dan pemanfaatan kawasan daerah sesuai rencana tata ruang	Angka luasan RTH KP publik terbangun di wilayah perkotaan	9,302 (Ha)	10,285 Ha	110,56	9,602	14,01	146,84	9,902 Ha	14,745	148,91
27.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Prosentase tingkat partisipasi angkatan kerja	62	71,61	115,5	64	70,65	110,39	67	69,34	103,5
28.	Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	Prosentase peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma jamsostek	22	22,45	102,05	23	23,11	100,5	24	24,01	100,04



### 3.2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RPJMD ( 2021 )

**TABEL 3.5**  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN INI DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RPJMD ( 2021 )**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD (2021)	Realisasi	Capaian Akhir RPJMD (2021) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1. Prosentase penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti	100	100	100
2.	Meningkatnya kualitas sarana irigasi guna mendukung produksi dan produktivitas pertanian	2. Prosentase panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik	82	76,61	93,43
3.	Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	3. Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)	141,80	144,58	101.96
4.	Meningkatnya produksi bahan pangan utama	4. Nilai produksi bahan pangan utama	826.000	809.536	98,01
5.	Meningkatnya produksi hasil perkebunan	5. Nilai produksi perkebunan	239.480	239.642	100,07



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD (2021)	Realisasi	Capaian Akhir RPJMD (2021) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan	6. Prosentase peningkatan produksi peternakan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daging</li> <li>• Telur</li> <li>• Susu</li> </ul>	0,73 0,95 4	11,61 -12,14 0,59	1589,84 - 14,67
		7. Prosentase peningkatan produksi perikanan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolam</li> <li>• Perairan Umum</li> </ul>	4,5 4	4,5 2,45	100 61,25
7.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	8. Prosentase jumlah PMKS yang ditangani	23,29	85,41	366,72
8.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku	9. Prosentase penurunan pelanggaran Perda/Perbup	95	-213	-224
9.	Meningkatnya koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pengurangan resiko bencana dan pemberdayaan masyarakat	10. Jumlah Desa Tangguh Bencana	10	8	80
10.	Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan dan kualitas keluaran	11. Angka Harapan Lama Sekolah	13,65	13,44	98,46



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD (2021)	Realisasi	Capaian Akhir RPJMD (2021) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pendidikan				
11.	Meningkatnya pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	12. Angka kematian ibu	41,64	138,46	136,14
		13. Angka kematian bayi	6,87	7,16	100
12.	Meningkatnya sektor industry	14. Angka pertumbuhan industri	3.500 (unit)	3.702	105,17
13.	Mengembangkan industri pariwisata untuk memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah	15. Jumlah kunjungan wisata	2.680.440 <b>112.000*</b> <b>(*perubahan target)</b>	520.998	427,05
		16. Prosentase kelompok seni budaya yang diberdayakan	52,50 <b>10.00*</b> <b>(*perubahan target)</b>	10,74	107,45
14.	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan meningkatnya kesempatan berusaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	17. Prosentase koperasi aktif	71	54,79	77,17
		18. Prosentase pertumbuhan usaha mikro	3,39	7,33	216,22
15.	Meningkatnya investasi didaerah	19. Nilai realisasi investasi (milyar rupiah)	533.365.637	2.476.069	366,70



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD (2021)	Realisasi	Capaian Akhir RPJMD (2021) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana	20. Prevalensi peserta KB aktif	72,5	70,77	97,61
17.	Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	21. Indeks pemberdayaan Gender (IPG)	74,39	72,24	97,11
18.	Meningkatnya Keberdayaan masyarakat perdesaan	22. Prosentase BUMDes yang aktif	13,9	76,38	549
		23. Jumlah desa tertinggal	103	0 *(sudah tidak ada desa dengan status desa tertinggal)	➤ 100
19.	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	24. Nilai SAKIP	A	B	-
20.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	25. Hasil nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85	84,29	99,09
21.	Meningkatnya profesionalitas ASN	26. Indeks Profesionalitas ASN	86	54,41	63
22.	Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	27. Prosentase jalan dengan kondisi baik	95	88,63	93,29
		28. Prosentase jembatan Kabupaten dengan	89,5	78,37	87,56



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD (2021)	Realisasi	Capaian Akhir RPJMD (2021) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kondisi baik			
		29. Prosentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	95	74,15	78,05
		30. Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	0	72,63	125,74
23.	Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	31. Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	77	84,15	109,28
		32. Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan	88,50	119,94	135,52
24.	Meningkatnya sistem informasi pemerintah daerah	33. Jumlah sistem informasi pemerintah daerah	4 Buah	22 buah	550
25.	Menurunnya beban pencemaran lingkungan	34. Prosentase penurunan beban pencemaran lingkungan	4	5,02	125,5
26.	Meningkatnya penataan dan pemanfaatan kawasan daerah sesuai rencana tata ruang	35. Angka luasan RTH KP publik terbangun di wilayah perkotaan	9,902 (Ha)	14,745	148,91



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD (2021)	Realisasi	Capaian Akhir RPJMD (2021) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	36. Prosentase tingkat partisipasi angkatan kerja	67	69,34	103,5
28.	Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	37. Prosentase peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma jamsostek	24	24,01	100,04



### 3.3. PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

#### Tingkat Capaian Efisiensi

No.	%	Keterangan Prosentase	Tingkat Efisiensi
1.	> 0	Lebih besar dari nol persen	Sangat Efisien
2.	= 0	Sama dengan nol persen	Efisien
3.	< 0	Kurang dari nol persen	Kurang Efisien

**TABEL 3.7**

#### PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1. Prosentase penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti	100	100	100	7.034.333.137	5.765.276.265	82,0	18



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.	Meningkatnya kualitas sarana irigasi guna mendukung produksi dan produktivitas pertanian	2. Prosentase panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik	82	76,61	93,43	35.355.682.099	30.150.666.656	85,28	8,15
3.	Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	3. Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)	141,80	144,58	101,96	1.579.171.400	1.511.967.059	95,74	6,22
4.	Meningkatnya produksi bahan pangan utama	4. Nilai produksi bahan pangan utama	826.000	809.536	98,01	29.640.255.900	27.348.043.309	92,27	5,74
5.	Meningkatnya produksi hasil perkebunan	5. Nilai produksi perkebunan	239.480	239.642	100,07	1.632.612.560	1.482.844.920	90,93	9,14
6.	Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan	6. Prosentase peningkatan produksi peternakan				11.733.770.335	11.641.705.868	99,22	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daging 0,73</li> <li>• Telur 0,95</li> <li>• Susu 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11,61</li> <li>-12,14</li> <li>0,59</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1589,84</li> <li>-</li> <li>14,67</li> </ul>					
		7. Prosentase peningkatan produksi perikanan				6.451.325.660	5.829.420.444	90,36	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolam 4,5</li> <li>• Perairan Umum 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4,5</li> <li>2,45</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100</li> <li>61,25</li> </ul>					



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	8. Prosentase jumlah PMKS yang ditangani	23,29	85,41	366,72	16.483.863.094	14.374.327.044	87,20	279,52
8.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku	9. Prosentase penurunan pelanggaran Perda/Perbup	95	-213	-224	421.879.900	257.585.845	61,06	-285,06
9.	Meningkatnya koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pengurangan resiko bencana dan pemberdayaan masyarakat	10. Jumlah Desa Tangguh Bencana	10	8	80	123.122.500	123.122.500	100	-20
10.	Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan dan kualitas keluaran pendidikan	11. Angka Harapan Lama Sekolah	13,65	13,44	98,46	965.696.246.316,35	929.714.150.183,35	96,27	2,19



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11.	Meningkatnya pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	12. Angka kematian ibu	41,64	138,46	136,14	4.899.070.969	3.979.058.495	81,22	54,92
		13. Angka kematian bayi	6,87	7,16	100	234.865.000	101.545.000	43,24	56,76
12.	Meningkatnya sektor industri	14. Angka pertumbuhan industri	3.520 unit	3.702	105,17	163.303.075	142.096.600	87	18,17
13.	Mengembangkan industri pariwisata untuk memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah	15. Jumlah kunjungan wisata	2.680.440 <b>112.000*</b> <b>(*perubahan target)</b>	520.998	427,05	4.733.663.350	4.370.302.750	92,32	334,73
		16. Prosentase kelompok seni budaya yang diberdayakan	52,50 <b>10.00*</b> <b>(*perubahan target)</b>	10,74	107,45	2.323.572.890	2.309.214.080	99,38	8,07
14.	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan meningkatkan kesempatan berusaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	17. Prosentase koperasi aktif	71	54,79	77,17	960.047.780	830.547.400	86,51	-9,34
		18. Prosentase pertumbuhan usaha mikro	3,39	7,33	216,22	1.209.016.000	873.263.690	72,23	143,99
15.	Meningkatnya investasi di daerah	19. Nilai realisasi investasi (milyar rupiah)	Rp.533.365.637	Rp.2.476.069	366,70	5.095.985.290	4.453.538.688	87,39	279,31



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16.	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana	20.Prevalensi peserta KB aktif	72,5	70,77	97,61	11.892.179.152	9.672.489.115	81,33	16,28
17.	Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	21.Indeks pemberdayaan Gender (IDG)	74,39	72,24	97,11	394.317.400	319.852.378	81,12	15,99
18.	Meningkatnya Keberdayaan masyarakat perdesaan	22.Prosentase BUMDes yang aktif	13,9	76,38	549	913.291.000	575.639.500	63,03	485,97
		23.Jumlah desa tertinggal	103 Desa	0 *(sudah tidak ada desa dengan status desa tertinggal)	➤ 100	456.508.000	96.009.000	21,03	78,97
19.	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	24.Nilai SAKIP	A	B	-	227.314.844	197.717.400	86,98	
20.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	25.Hasil nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85	84,29	99,09	318.228.120	296.768.088	93,27	5,82
21.	Meningkatnya profesionalitas ASN	26.Indeks Profesionalitas ASN	86	54,41	63	7.200.414.500	5.943.857.540	83	-20



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
22.	Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	27. Prosentase jalan dengan kondisi baik	95	88,63	93,29	64.210.324.100	60.432.846.064	94,12	-0,83
		28. Prosentase jembatan Kabupaten dengan kondisi baik	89,5	78,37	87,56	6.041.621.321	5.212.451.009	86,28	1,28
		29. Prosentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	95	74,15	78,05	8.650.156.748	5.955.804.359	68,85	9,2
		30. Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	0	72,63	125,74	8.628.290.861	7.117.521.555	82,49	43,25
23.	Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	31. Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	77	84,15	109,28	131.879.000	122.423.564	92,83	16,45
		32. Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan	88,50	119,94	135,52	745.401.400	738.520.432	99,08	36,44
24.	Meningkatnya sistem informasi pemerintah daerah	33. Jumlah sistem informasi pemerintah daerah	4 Buah	22 buah	550	160.000.000	160.000.000	100	450
25.	Menurunnya beban pencemaran lingkungan	34. Prosentase penurunan beban pencemaran lingkungan	4	5,02	125,5	13.246.638.090	12.464.590.005,19	94,10	31,4



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
26.	Meningkatnya penataan dan pemanfaatan kawasan daerah sesuai rencana tata ruang	35. Angka luasan RTH KP publik terbangun di wilayah perkotaan	9,902 (Ha)	14,745	0,67	8.835.478.360	7.513.555.942,10	85,04	-84,37
27.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	36. Prosentase tingkat partisipasi angkatan kerja	67	69,34	103,5	1.192.679.460	1.122.289.570	94	9,5
28	Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	37. Prosentase peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma jamsostek	24	24,01	100,04	178.980.070	159.830.320	89,30	10,74



### 3.4. ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan atas capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2021 dengan tahun sebelumnya dan kondisi awal, sehingga dapat membandingkan data kondisi awal hingga realisasi dan capaian Akhir RPJMD, sehingga dapat dijadikan dasar (kondisi awal) penyusunan RPJMD periode berikutnya .

**Misi 1 : Melaksanakan ajaran agama dan / atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmoni.**

**Tujuan : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama**

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Persentase penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti	100	100	100	100

Sasaran 1 : Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman dengan indikator Persentase penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti yang pada tahun 2021 ditargetkan 100% dan terealisasi 100% dengan kategori **sangat berhasil** upaya - upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :karena :



1. Terbangunnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan;
2. Terciptanya ketertiban, ketentraman, dan keamanan yang berbasis pada kesadaran dan partisipasi masyarakat;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik, demokrasi dan HAM.

**Misi 2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan**

**Tujuan : Terwujudnya kemandirian menuju swasembada pangan melalui peningkatan produksi Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan**

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
2. Meningkatkan kualitas sarana irigasi guna mendukung produksi dan produktivitas pertanian	Persentase panjang saluran irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	87,06	82	76,61	93,43	76,61

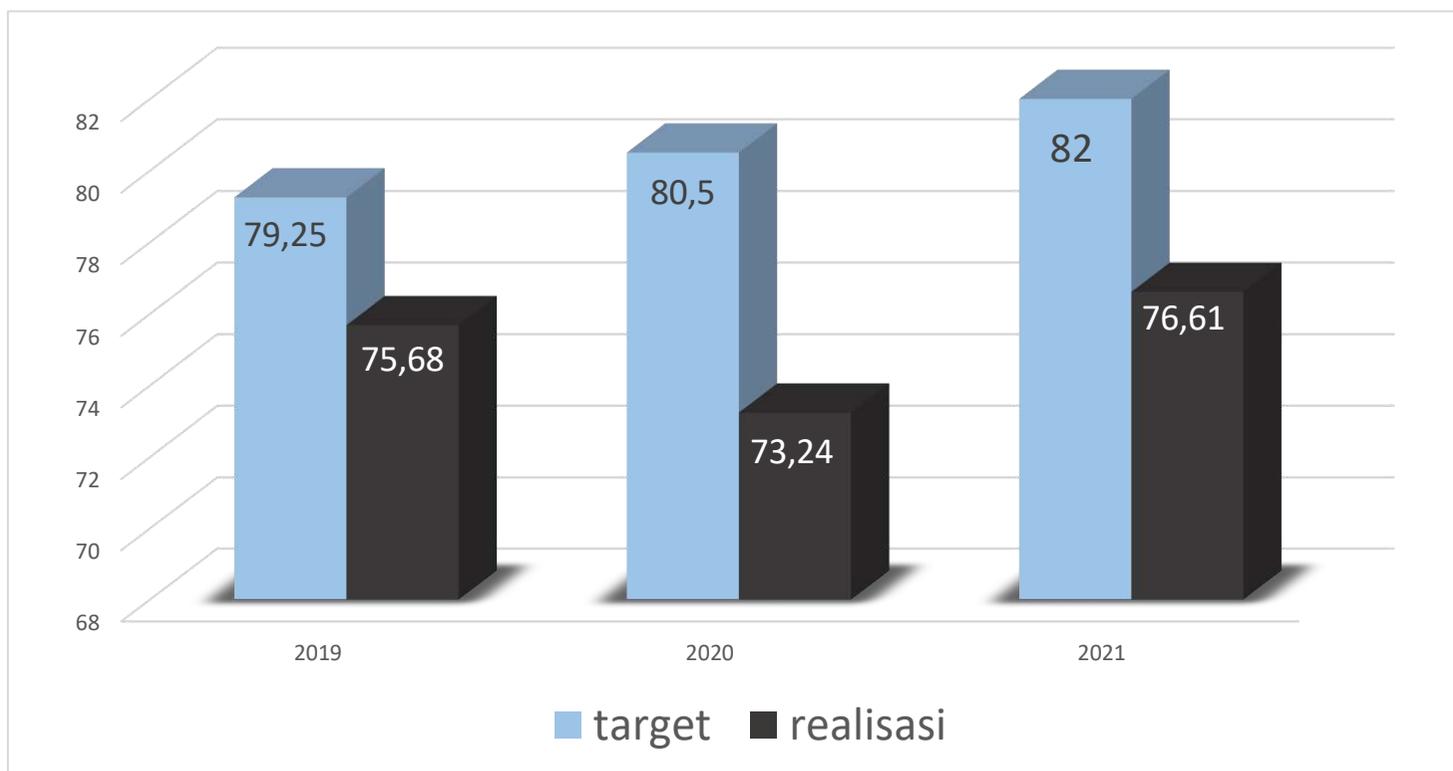
Sasaran 2 : Prosentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi baik. Pada Tahun 2021 ditargetkan 82 % dan realisasinya 76,61 % dengan capaian 93,43 %. Capaian tersebut masuk dalam katagori Sangat Berhasil .Hal ini disebabkan :

1. Tercukupinya anggaran Rehabilitasi /Pemeliharaan Infrastruktur Irigasi Tahun Anggaran 2021 sehingga rencana Pelaksanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi terealisasi .



2. Disamping itu cuaca di tahun 2021 sangat mendukung sehingga pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada Saluran Sekunder dapat terealisasi semua.
3. Juga pada tahun 2021 kesadaran petani terkait proses pelaksanaan Kontruksi sangat besar dimana, mereka dengan penuh kesadaran bersedia melaksanakan gilir ( aliran air mati sementara) selama proses pelaksanaan kontruksi .

Grafik  
SALURAN IRIGASI DALAM KEADAAN BAIK





Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir	
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
3.	Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)	134,92	141,80	144,58	101,96	144,58

Sasaran 3 : Rata-rata ketersediaan pangan utama per penduduk menggambarkan jumlah beras yang tersedia bagi tiap orang penduduk di Kabupaten Kediri per tahun untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsi. Ketersediaan pangan utama dipengaruhi oleh jumlah produksi beras, keluar masuknya beras dari dan ke luar Kabupaten Kediri, stok akhir bulog serta jumlah penduduk Kabupaten Kediri. Target rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk Kabupaten Kediri tahun 2021 adalah sebanyak 141,80 kg/kapita/tahun. Pada akhir tahun 2021 diperoleh jumlah ketersediaan pangan utama sebanyak 144,58 kg/kapita/tahun atau dengan capaian kinerja sebesar 101,96 % (kategori Sangat Memuaskan). Sedangkan jumlah kebutuhan konsumsi beras per penduduk Kabupaten Kediri menurut data Badan Pusat Statistik sebanyak 72,24 kg/kapita/tahun. Ini menunjukkan pada tahun 2021 Kabupaten Kediri surplus ketersediaan pangan utama per penduduk rata-rata sebesar 72,34 kg/kapita/tahun. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja antara lain : 1) stok cadangan pangan pemerintah di Bulog yang mencukupi; 2) produksi gabah Kabupaten Kediri



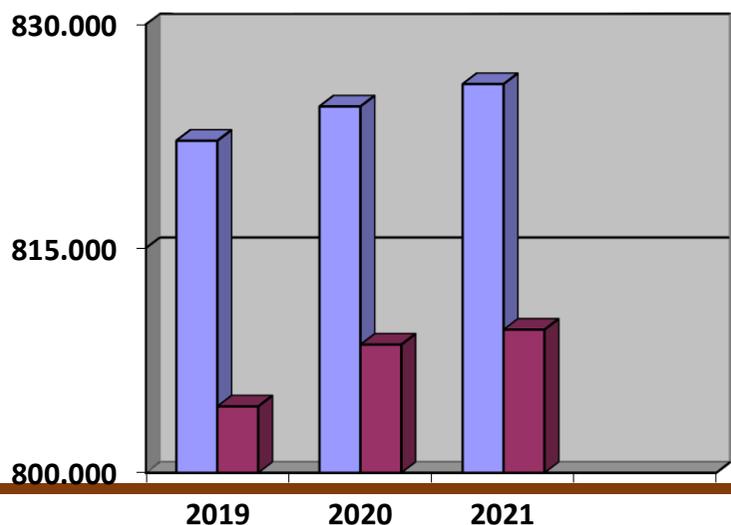
sebagian digunakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kediri dan sebagian dipasarkan ke luar Kabupaten Kediri; dan 3) alur perdagangan beras di Kabupaten Kediri lancar dan secara umum penggilingan banyak mengambil bahan baku (gabah) dari luar Kabupaten Kediri untuk dijadikan stok/ cadangan pangan masyarakat. Selanjutnya, DKPP Kabupaten Kediri berperan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat mencukupi melalui pemantauan di sisi produksi, cadangan pangan pemerintah dan masyarakat serta stok yang ada di gudang distributor/ penggilingan.





Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir	
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
4.	Meningkatnya produksi bahan pangan utama	Nilai produksi bahan pangan utama (ton)	814.108	826.000	809.536	98,01	809.536

Sasaran 4 : Capaian nilai produksi bahan pangan utama mencapai 98,01 %, rencana tindak lanjut yaitu dengan peningkatan produktivitas melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP), penggunaan bibit unggul, pemupukan yang berimbang, peningkatan kesuburan tanah, penggunaan teknologi pertanian maupun pola tanam.



**Produksi Bahan Pangan Utama**

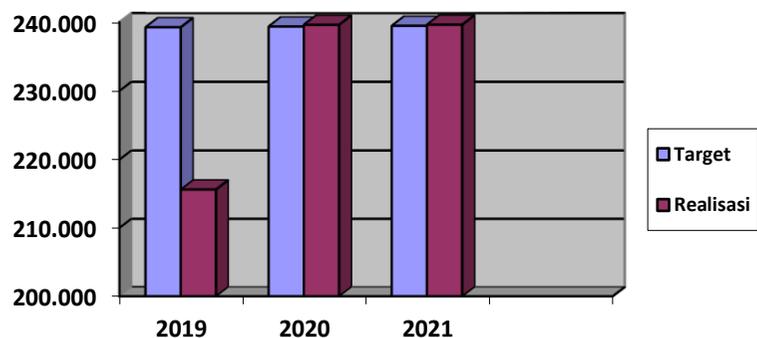
	2019	2020	2021
Target (Ton)	822.200	824.500	826.000
Realisasi (Ton)	804.426	808.539	809.536

■ Target  
■ Realisasi



Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
5. Meningkatnya produksi hasil perkebunan	Nilai produksi perkebunan (x 10 ton)	238.158	239.480	239.642	100,07	239.642

Sasaran 5 : Capaian Nilai Produksi perkebunan mencapai 100,07%, hal ini dikarenakan adanya peningkatan produksi hasil perkebunan dari tahun 2021. Rencana Tindak Lanjut, adalah dengan peningkatan produktivitas melalui penggunaan bibit unggul dan pengendalian hama penyakit secara terpadu.



**Produksi Perkebunan Utama**

	2019	2020	2021
Target (X 10 Ton)	239,270	239.380	239.480
Realisasi (X 10 Ton)	215,640	239.629	239.642



Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
6. Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan	Persentase peningkatan produksi peternakan					
	- Daging	0,63	0,73	11,61	1589,84	11,61
	- Telur	0,55	0,95	-12,14	-	-12,14
	- Susu	0,65	4	0,59	14,67	0,59

Sasaran 6 : Persentase peningkatan produksi peternakan menggambarkan seberapa besar kenaikan produksi di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Produksi peternakan yang dihitung meliputi produksi daging, telur dan susu. Pada tahun 2021, produksi daging mencapai 21.666,968 ton. Sedangkan produksi di tahun 2020 sebanyak 19.413,829 ton. Ini berarti pada tahun 2021 terjadi peningkatan produksi daging sebanyak 2.253,139 ton atau sebesar 11,61% dengan capaian kinerja Sangat Memuaskan (1.589,84%). Untuk komoditas telur, pada tahun 2021 produksi sebanyak 63.917,560 ton. Sedangkan produksi telur di tahun 2020 sebanyak 72.753,199 ton, sehingga produksi telur di tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 8.835,639 ton atau sebesar 12,14%. Produksi susu pada tahun 2021 sebanyak 21.112,858 ton. Dibandingkan produksi di tahun 2020 yang sebanyak 20.989,662 ton, terjadi peningkatan produksi susu sebesar 123,196 ton atau 0,59%. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya pandemi Covid-19 berdampak pada banyak sektor riil termasuk sektor usaha peternakan. Lesunya perekonomian pelaku usaha peternakan menyebabkan kurangnya permodalan untuk operasional usaha peternakan serta naiknya biaya operasional membuat banyak peternak



yang gulung tikar atau mengurangi populasi. Hal ini tentu berdampak pada jumlah produksi peternakan. Yang paling terlihat penurunan produksinya adalah komoditas telur. Harga Day Old Chicken(DOC) ayam petelur yang naik membuat peternak kesulitan untuk melakukan repopulation. Ayam yang sudah berusia tua dan tidak produktif atau lebih dikenal dengan ayam afkir tidak bisa diganti dengan yang lebih muda. Ayam afkir yang dijual tidak sebanding dengan harga DOC yang sudah tinggi sehingga peternak kehabisan modal untuk memperbarui ayam. Dalam rangka upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya di sektor peternakan, pada tahun 2021 telah disalurkan bantuan stimulus untuk mendorong usaha peternakan bagi 1.995 peternak terdampak pandemik Covid-19, hibah uang pengembangan peternakan bagi 31 kelompok ternak produktif serta bantuan hibah peralatan pemrosesan pakan ternak. Adapun faktor pendorong keberhasilan pencapaian target jumlah produksi daging dan susu pada tahun 2021 antara lain terus dilaksanakannya kegiatan peningkatan kemampuan peternak dalam meningkatkan produksi peternakan secara berkelanjutan melalui pelatihan peningkatan produksi peternakan ruminansia dan non ruminansia serta pelatihan pengembangan agribisnis peternakan yang bertujuan mendorong berkembangnya usaha peternakan dengan wawasan bisnis yang mampu menghasilkan produk peternakan yang berdaya saing. Pada akhir tahun 2021 Kabupaten Kediri menerima program dari Kementerian Pertanian yakni Pengembangan Desa Korporasi Sapi dalam rangka akselerasi peningkatan populasi sapi dan produksi daging sapi untuk kecukupan protein hewani serta peningkatan kesejahteraan peternak. Melalui pengembangan korporasi peternakan bisa menjadi langkah startegis meningkatkan nilai produksi dalam negeri dengan adanya sinergi dan kolaborasi antar pihak dari hulu sampai ke hilir. Program ini dilaksanakan melalui penyediaan ternak (500 ekor sapi jantan bakalan dan 500 ekor sapi dara pembibitan) dan sarana pendukung desa korporasi sapi (pembangunan 5 lokasi kandang sapi, obat serta vaksin sapi, pakan, 5 unit instalasi bio gas dan 5



unit timbangan digital ternak). Kegiatan tersebut masih akan terus dijaga keberlanjutannya di tahun 2022 dengan sinergi pihak terkait untuk menjaga tren positif peningkatan produksi peternakan di masa yang akan datang.

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
6. Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan					
	- Kolam	6,86	4,5	4,5	100	4,5
	- Perairan umum	1,43	4	2,45	61,25	2,45

Ket : \*dalam satuan Ton

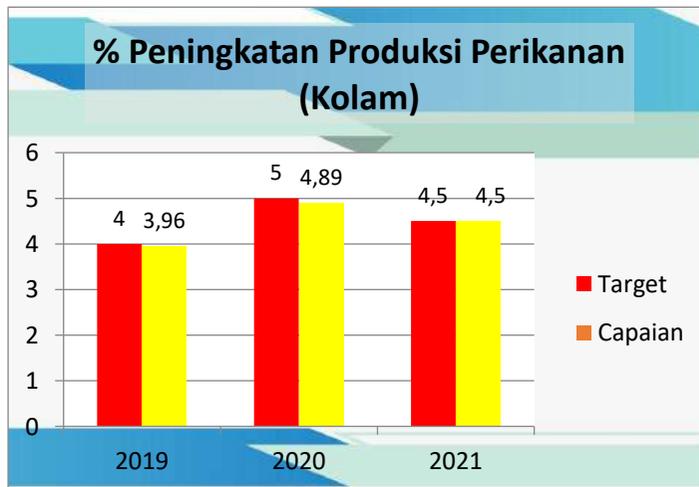
Sasaran 6 : Sasaran : meningkatnya produksi perikanan dengan indikator sasaran persentase peningkatan produksi perikanan pada tahun 2021 ditargetkan untuk perikanan di kolam sebesar 4,51 %; dan perairan umum sebesar 4 % dimana terealisasi untuk produksi kolam sebesar 4,53 %; dan perairan umum sebesar 2,45 % dengan capaian kinerja sebesar 100,44 % untuk kolam; dan sebesar 61,25 % perairan umum, dengan demikian kategori capaian kinerja Dinas Perikanan secara umum adalah baik.

Penyebab keberhasilan kinerja tersebut adalah :

1. Adanya kegiatan pembinaan untuk kelompok pembudidaya ikan dengan mengadakan sosialisasi CPIB ( cara pembenihan ikan yang baik), CBIB (cara budidaya ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik) serta pendampingan pengajuan sertifikat CPIB, CBIB dan CPPIB.
2. Adanya kegiatan pemberian bantuan/hibah kepada masyarakat (kelompok pembudidaya ikan/pokdakan) berupa benih, induk, pakan dan saprodi (peralatan budidaya ikan)



3. Kegiatan sosialisasi dalam rangka penumbuhan pembudidaya ikan baru
4. Adanya pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan melalui pemantauan kualitas air, pemantauan obat-obatan dan pemantauan kualitas pakan serta layanan cepat SIMOLI CEKAT (Inovasi Mobil Keliling Cek Kualitas Air Budidaya Air Tawar)
5. Sertifikasi tanah dalam rangka memfasilitasi akses permodalan pembudidaya ikan
6. Adanya penguatan kelembagaan melalui kegiatan pembinaan kelembagaan perikanan dan penilaian kelas kelompok budidaya ikan
7. Adanya kegiatan pelatihan tentang teknologi budidaya dan pembenihan ikan
8. Kondisi perairan umum yang sudah overfishing (kelebihan penangkapan) sehingga diperlukan restocking dan kebijakan pengaturan penangkapan di perairan umum
9. Telah disusun peraturan daerah perlindungan sumber daya ikan di perairan umum Kabupaten Kediri





**Misi 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman**

**Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan, ketentraman, ketertiban dan keamanan di masyarakat**

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir	
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
7.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase jumlah PMKS yang ditangani	20,61	23,29	85,41	366,72	85,41

Sasaran 7 : Keberhasilan capaian kinerja 366,72% disebabkan penambahan objek sasaran kegiatan sejalan dengan penanganan Covid-19 pada PMKS berdampak, selain itu juga adanya kerjasama dan dukungan yang baik antara pemerintah dengan potensi dan sumber kesejahteraan sosial serta pihak – pihak terkait.



Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir	
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
8.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku	Persentase penurunan pelanggaran Perda/Perbup	84	95	-213	-224	-213

Sasaran 8 : Tidak tercapainya indikator sasaran yaitu % penurunan pelanggaran perda/perbup disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut: Terbitnya Peraturan Bupati Kediri yang baru pada tanggal 15 September 2020 yaitu Perbup Kediri Nomor 44 Tahun 2020 tentang “Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19” pada Pasal 9 menyebutkan bahwa untuk mengoptimalkan penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan, pemerintahan daerah melakukan pengawasan ke masyarakat melalui kegiatan patroli serta berdasar pada Perda No 6 tahun 2017 tentang “Penyelenggaraan Ketertiban Umum” yang menyebabkan: Kurangnya sosialisasi perbup tersebut di atas dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang mengurangi kegiatan tatap muka yang sifatnya menyebabkan kerumunan masa maka kegiatan sosialisasi Perbup tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Kegiatan penertiban protokol kesehatan pada Tahun 2020 yang semula 3 kali sehari, pada Tahun 2021 menjadi 6 kali sehari.



Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
9	Meningkatnya koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pengurangan risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat					
	Jumlah Desa Tangguh Bencana	-	10	8	80	8

Sasaran 9 : Tidak tercapai dikarenakan penyelenggaraan kegiatan destana yang bersifat sosialisasi ditiadakan pada saat pandemi Covid19 tahun 2020, jumlah Desa Tangguh Bencana keseleruhan selama 5 tahun ada 8 desa dari target 10 desa.



**Misi 4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan**

**Tujuan : Meningkatkan kualitas pendidikan dengan biaya murah (terjangkau) serta meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan formal, non formal dan informal**

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
10. Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan dan kualitas keluaran pendidikan	Angka harapan lama sekolah (tahun)	12,14	13,43	13,15	97,92	13,15

Sasaran 10 :

**EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

NO	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Sekolah gratis	Sekolah bebas pungutan, dan beasiswa bagi keluarga tidak mampu sampai jenjang perguruan tinggi
2.	Angka putus sekolah	Diarahkan untuk mengikuti pendidikan kesetaraan (Kejar Paket A,B, dan C)
3.	Warga Kab. Kediri bersekolah di luar kota	Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah berbasis IT dan workshop kompetensi guru



**Misi 5. : Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan**

**Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
11. Meningkatkan pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Angka Kematian Ibu	68,71	41,64	138,46	136,14	138,46
	Angka Kematian Bayi	7,5	6,87	7,16	100	7,16

Sasaran 11 :

1. Angka Kematian Ibu : Kenaikan AKI di tahun 2021 disebabkan adanya pandemi Covid-19 dimana tenaga kesehatan kurang siap dan minimnya APD yang dimiliki nakes. Ditindak lanjuti dengan pemantauan dan pelayanan yang berkualitas dengan dokter penanggungjawab KIA dan bidan memantau ibu hamil risiko tinggi dengan ketat dan melakukan rujukan dini terencana.
2. Angka Kematian Bayi : Dimana pada masa ini selalu dipantau pertumbuhan dan perkembangan bayi sehingga mengurangi resiko kematian.Selain itu pencegahan juga dilakukan pada saat bayi berada dalam kandungan, dengan selalu memantau kondisi kesehatan ibu hamil.



**Misi 6. Menumbuhkembangkan kreativitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro**

**Tujuan : Mengembangkan Kreativitas, Produktivitas dan Pendapatan Masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah**

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir	
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
12.	Meningkatnya sektor industri	Angka pertumbuhan industri (unit)	2.129	3.550	3.702	104,8	3.702

Sasaran 12 : pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) sudah mulai mengerti betapa pentingnya legalitas, sehingga indikator Angka pertumbuhan industri (unit) dapat tercapai sebesar 104,8 %.



**Misi 7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah**

**Tujuan : Mengembangkan industri pariwisata untuk mendorong kreativitas dan produktivitas memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah serta meningkatkan daya saing perekonomian berbasis sistem inovasi daerah**

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
13. Mengembangkan industri pariwisata untuk memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah	Jumlah kunjungan wisata	2.438.611	2.680.440	520.998	19,43	520.998
	Persentase kelompok seni budaya yang diberdayakan	50,00	52,50	10,74	20,38	10,74

Sasaran 13 :

- Jumlah kunjungan wisata: Jumlah Kunjungan Wisata yang tercatat tahun ini hanya 520.998 orang, sedang pada tahun dasar jumlah kunjungan wisata adalah sebanyak 1.603.679 orang, sehingga capaian kinerjanya yakni 19,43%. Hal ini seperti sudah dijelaskan diatas, terkait mewabahnya virus covid-19 yang menyebabkan ditutupnya obyek-obyek wisata di Kabupaten Kediri, selain berimbas signifikan pada jumlah PAD juga mempengaruhi jumlah kunjungan wisata. Sejak tahun lalu adalah tahun-tahun terpuruknya pariwisata Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Kediri. Fokus pemerintah adalah menuntaskan wabah ini, walau tetap berusaha menstabilkan perekonomian. Hingga era adaptasi atau disebut new normal diberlakukan, obyek-obyek wisata di Kabupaten Kediri belum mendapat ijin dibuka kembali, dan baru uji coba dibuka kembali untuk 3 obyek wisata pada bulan Oktober 2021, serta 1 obyek lagi pada bulan Nopember 2021.



- Persentase kelompok seni budaya yang diberdayakan: Indikator kedua yakni Persentase Kelompok seni budaya yang diberdayakan, dengan target sebesar 52,5% juga belum tercapai, karena perolehannya hanya sebesar 10,74% dengan penjelasan bahwa dari 1.517 grup yang terdaftar, hanya ada 163 grup yang diberdayakan. Diberdayakan maksudnya adalah diajak mengisi kegiatan / event yang kita selenggarakan (di dalam daerah), atau mengisi pagelaran di luar daerah, bahkan dalam bentuk support ketika mereka akan mengadakan / mengikuti pertunjukan di luar yang kita selenggarakan yakni berupa pemberian surat izin rekomendasi (ke luar daerah) dan izin advis (di dalam daerah). Hanya saja, karena pandemi covid-19 ini tidak hanya berimbas pada dunia pariwisata, namun juga merambah ke social budaya, dimana masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan yang salah satunya adalah menjaga jarak (tidak berkerumun/bergerombol), menyebabkan aktivitas pagelaran baik di dalam maupun di luar daerah tidak diperbolehkan sejak pertengahan Maret 2020 sampai saat ini. Tentu hal ini berdampak sangat signifikan pada kelompok-kelompok seni yang ada, dimana mereka tidak bisa menyalurkan kegiatan berkesenian di ranah publik seperti menggelar festival, lomba, parade budaya dan sejenisnya secara live. Walau di triwulan terakhir tahun ini, pagelaran dikemas secara virtual, namun hanya beberapa group seni yang dilibatkan.



**Misi 8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan**

**Tujuan : Meningkatkan keberlanjutan kerjasama antara koperasi, pemerintah dan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat**

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir
			TARGET	Realisasi	Capaian (%)	
14. Meningkatnya Kualitas kelembagaan koperasi dan meningkatnya kesempatan berusaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Persentase koperasi aktif	68,07	71	54,79	77,17	54,79
	Persentase pertumbuhan usaha mikro	0,68	3,39	7,33	216,22	7,33

Sasaran 14 : Keberhasil dalam mencapai indicator sasaran persentase koperasi aktif didukung dengan Pemberian pembinaan secara khusus terhadap koperasi yang aktivitasnya cenderung menurun.

Sedangkan untuk indicator sasaran Persentase pertumbuhan usaha mikro didukung dengan Meningkatnya Fasilitas bagi UMKM berupa Pelatihan dan Promosi, sedang untuk hambatannya adalah belum secara maksimal UMKM mengakses fasilitas pelatihan dan promosi, guna meminimalisir hambatan tersebut kami lebih fokus untuk memaksimalkan fasilitas pelatihan dan promosi.



**Misi 9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha**

**Tujuan : Meningkatnya iklim investasi**

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir	
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
15.	Meningkatnya investasi di daerah	Nilai Realisasi Investasi (milyar rupiah)	418,259894	533,365637	2.476,069	366,70	2.476.069

Sasaran 15 : Adapun penyebab yang bisa diperkirakan atas pertumbuhan investasi yang luar biasa ini adalah adanya intervensi kebijakan pemerintah yang ada di Wilayah Kabupaten Kediri, yang dituangkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), berupa pelabuhan udara (bandara) dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur, yang salah satu di dalamnya adalah Kawasan Selingkar Wilis di Kabupaten Kediri dan sekitarnya.



**Misi 10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan**

**Tujuan : Meningkatkan kualitas masyarakat menuju masyarakat partisipatif dengan pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
16.	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana	Prevalensi peserta KB Aktif	70,81	72,5	70,77	97,61	70,77

Sasaran 16: Peserta KB aktif MKJP yang tinggi akan berpengaruh pada terjadinya drop out pemakaian program KB karena MKJP penggunaannya minimal 3 tahun. Kenaikan capaian kinerja MKJP ini diupayakan dengan pengadakan baik KIE, Konseling maupun pelayan KB khususnya pelayanan MKJP juga melalui pelayanan pendekatan kepada masyarakat

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
17.	Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,09	74,39	72,24	97,11	72,24



Sasaran 17 : Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan dengan kategori indeks pemberdayaan gender yang ditargetkan pada tahun 2021 sebesar 74,39 dan terealisasi sebesar 72,24 dengan capaian 97,11 yang termasuk dalam kategori **sangat berhasil**, dan menyumbang sebanyak 97,11% dari target akhir RPJMD ,hal ini upaya - upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan, pelatihan perempuan
2. Adanya evaluasi pengarusutamaan gender
3. Mengadakan pameran kelompok usaha perempuan
4. Pembinaan P2WKSS (peningkatan peran wanita keluarga sehat sejahtera)
5. Pelatihan pendampingan korban KDRT

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
18.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase BUMDes yang aktif	-	13,9	76,38	549	76,38
		Jumlah desa tertinggal	113	103 Desa	0	100	0

Sasaran 18 : Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Rencana Tindak Lanjut

Dari uraian data tersebut di atas, maka gambaran evaluasi dan analisis capaian kinerja hasil pengukuran kinerja sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Sasaran Persentase BUMDes yang aktif dari target 13,9% dapat terealisasi 76,38% maka capaian kinerjanya lebih dari 100 % . Keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan kegiatannya Penunjang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2. Di Kabupaten Kediri pada Tahun 2021 sudah tidak ada desa dengan status desa tertinggal. Untuk mendukung tercapainya sasaran untuk mengurangi Desa Tertinggal. DPMPD Kabupaten Kediri hanya memfasilitasi kegiatan tersebut sedangkan status dari desa merupakan keputusan terakhir ada Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

**Misi 11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi**

**Tujuan : Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang profesional**

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
19. Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	CC	A	B	-	-

Sasaran 19 : Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator nilai SAKIP yang ditargetkan pada tahun 2021 yaitu A dan realisasinya B\* (sementara) yang termasuk dalam kategori **baik**, hal ini upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :oleh :



1. Memperkuat komitmen bersama
2. Peningkatan koordinasi Tim, Fasilitasi SAKIP dan Penbinaan dari Menpan RB dan Biro Organisasi
3. Penguatan kapasitas dan komitmen Kepala OPD
4. Penyelarasan Indikator Kinerja pada Dokumen Perencanaan
5. Membangun sistem secara elektronik (Persiapan E-SAKIP)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
20.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Hasil nilai IKM (Indeks kepuasan masyarakat)	80	85	84,23	99,09	84,23

Sasaran 20 : Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan dengan indikator hasil nilai IKM yang ditargetkan pada tahun 2021 sebesar 85 dan terealisasi 84,23 dengan capaian 99,09% yang termasuk dalam kategori baik, dan menyumbang sebanyak 98,82% dari target akhir RPJMD, hal ini upaya - upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pembinaan pelayanan publik diseluruh perangkat daerah pelayanan
2. Mengadakan monitoring pada perangkat daerah pelayanan
3. Mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan.



Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir	
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
21	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	-	86	54,41	63	54,41

Sasaran 21 : Meningkatkan profesionalitas ASN dengan indikator Indeks profesionalitas ASN dengan target 86 pada tahun 2021 dan terrealisasi 54,63 dengan capaian 63%

tindaklanjut dalam peningkatan Nilai Indeks Profesionalitas ASN dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Mendorong pejabat struktural untuk menempuh pendidikan / izin belajar dalam rangka menyesuaikan kualifikasi pendidikannya dengan syarat jabatan
2. Meningkatkan kompetensi pejabat struktural melalui pendidikan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatannya.



**Misi 12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang**

**Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur guna menunjang Percepatan Pembangunan**

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
22. Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Persentase jalan dengan kondisi baik	86	95	88,63	93,29	88,63
	Persentase jembatan kabupaten dengan kondisi baik	77,85	89,5	78,37	87,56	78,37

Sasaran 22 :

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan rencana tindak lanjut :

Pada tahun 2021 Prosentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dari target 95 % dapat terealisasi 88,63% dengan capaian 93,29% . Dilihat dari realisasi tidak memenuhi target karena dari Target kinerja awal tetap tetapi ada perubahan (pengurangan) dana untuk revocusing Covid 19.Tetapi dilihat dari Capaian Kinerja 93,29% sudah termasuk sangat berhasil.Keberhasilan disebabkan karena penanganan lebih efektif dan difokuskan pada jalan kabupaten, juga pemeliharaan rutin jalan alokasinya ditambah dan Penanganannya tepat sasaran karena dibantu aplikasi Hallo Masbup

Pada tahun 2021 Prosentase Jembatan dalam kondisi baik dari target 89,50 % dapat terealisasi 78,37% dengan capaian 87,56% .Dilihat dari realisasi tidak memenuhi target karena dari Target kinerja awal tetap tetapi ada perubahan (pengurangan) dana untuk revocusing Covid 19 .Selain itu tidak memenuhi target karena ada selain ada pengurangan dana



untuk covid 19, juga ada kegiatan legder jembatan yaitu pendataan kembali untuk jembatan kabupaten saja yang dulu awalnya total jembatan berjumlah 588 buah menurun menjadi 430 buah. Tetapi dilihat dari Capaian Kinerja 87,56% sudah termasuk berhasil. Keberhasilan disebabkan karena penanganan lebih efektif dan difokuskan pada jembatan kabupaten.

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
22. Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	50	95	84,59	89,04	84,59
	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	100	0	0	0	0

Sasaran 22 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan Persentase penurunan luasan kawasan kumuh dengan target tahun 2021 :

Untuk pencapaian tersebut diatas, upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Dilihat dari realisasi Indikator Kinerja, hal tersebut tidak memenuhi target , Hal ini akibat adanya refocusing anggaran untuk Covid 19
- b. Berdasarkan SK Bupati Kediri Nomor 188.45/551/418.32/2014 kawasan kumuh di Kabupaten Kediri seluas 25,98 Ha telah tuntas tertangani tahun 2018. Sedangkan berdasarkan SK Bupati Kediri Nomor 188.45/249/418.08/2019 ada



penambahan luasan kawasan kumuh sebesar 58,84 Ha di tahun 2019 tertangani sebesar 3,89 Ha dan berdasarkan SK Bupati Kediri Nomor 188.45/146/418.08/2020 terdapat kawasan kumuh sebesar 218,74 Ha pada tahun 2020 yang dapat di tangani seluas 1,18 Ha. Sedangkan untuk Tahun 2021 yang dapat tertangani seluas 72,63 Ha sehingga total kawasan kumuh yang tertangani sebesar 73,81 Ha. Dengan demikian sisa kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar 144,93 Ha.

Upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1. Hasil intervensi program KOTAKU dan Dana Desa.
2. Pembangunan drainase lingkungan di kawasan kumuh.
3. Pembangunan jalan lingkungan di kawasan kumuh.

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
23. Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perhubungan	--	77	84,15	109,28	84,15
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan	--	88,5	119,94	135,52	119,94

Sasaran 23 : Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah dengan 2 (dua) indikator yaitu :



1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan dengan target tahun 2021 sebesar 77 dan terealisasi sebesar 84,15 dengan capaian 109,28 yang termasuk dalam kategori **sangat berhasil** dikarenakan sudah banyak pengusaha angkutan yang sudah mulai memahami aturan terkait keselamatan angkutan barang dan serta adanya pembinaan dan atau diklat teknis secara berkala bagi tenaga penguji kendaraan bermotor.
2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan dengan target tahun 2021 sebesar 88,5% dan terealisasi sebesar 119,94% dengan capaian 135,52% yang termasuk dalam kategori **sangat berhasil** Hal ini upaya - upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :
  1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik di bidang perhubungan
  2. Pengadaan sistem informasi manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) berbasis IT
  3. Peningkatan kuantitas pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan, antara lain ;
    - a. Rambu dan RPPJ (Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan)
    - b. APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalulintas) dalam bentuk *traflight light* dan *Flashing Amber (FA)*
    - c. Pengecatan Marka Jalan



### Misi 13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi

#### Tujuan : Mengembangkan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir	
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
24.	Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah	--	4	21	550	21

Sasaran 24 : Meningkatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan indikator Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan target ditahun 2021 sebesar 4 dan terealisasi 21 dengan capaian 550%, termasuk kategori **sangat berhasil** dan menyumbang sebanyak 350 % dari target akhir RPJMD hal ini upaya - upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Adanya tim teknis yang khusus untuk menangani IT sebanyak (5 orang)
2. Dukungan infrastruktur yang sudah memadai
3. Tersedianya *bandwith* / koneksi internet, domain, *hosting*
4. Dukungan dan kebijakan pimpinan

Dari faktor- faktor diatas maka dapat terbangun 21 sistem informasi pemerintah daerah, yaitu :

1. *smkt-bagum.kedirikab.go.id*
2. *sadapdisdik.kedirikab.go.id*
3. *kedirimenang.kedirikab.go.id*



4. [perpustakaan.kedirikab.go.id](http://perpustakaan.kedirikab.go.id)
5. [sidamis.kedirikab.go.id](http://sidamis.kedirikab.go.id)
6. [simtaru.kedirikab.go.id](http://simtaru.kedirikab.go.id)
7. [silvi.kedirikab.go.id](http://silvi.kedirikab.go.id)
8. [kianprima.kedirikab.go.id](http://kianprima.kedirikab.go.id)
9. [e-sakip.kedirikab.go.id](http://e-sakip.kedirikab.go.id)
10. [mapanji.kedirikab.go.id](http://mapanji.kedirikab.go.id)
11. [e-spt.kedirikab.go.id](http://e-spt.kedirikab.go.id)
12. [simpatda.kedirikab.go.id](http://simpatda.kedirikab.go.id)
13. [esptpd.kedirikab.go.id](http://esptpd.kedirikab.go.id)
14. [dash-pajak.kedirikab.go.id](http://dash-pajak.kedirikab.go.id)
15. [e-layanan.kedirikab.go.id](http://e-layanan.kedirikab.go.id)
16. [epotensi.kedirikab.go.id](http://epotensi.kedirikab.go.id)
17. [esig.kedirikab.go.id](http://esig.kedirikab.go.id)
18. [sipanji.kedirikab.go.id](http://sipanji.kedirikab.go.id)
19. [sappakop.kedirikab.go.id](http://sappakop.kedirikab.go.id)
20. [aktivasisdukcapil.kedirikab.go.id](http://aktivasisdukcapil.kedirikab.go.id)
21. [pemdes.kedirikab.go.id](http://pemdes.kedirikab.go.id)
22. [e-pokir.kedirikab.go.id](http://e-pokir.kedirikab.go.id)



**Misi 14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang**

**Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir	
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
25.	Menurunnya beban pencemaran lingkungan	Persentase penurunan beban pencemaran lingkungan	-	4	5,02	125,5	5,02

Sasaran 25 : Menurunnya beban pencemaran lingkungan dengan indikator sasaran Persentase penurunan beban pencemaran lingkungan yang ditargetkan pada tahun 2021 sebesar 4% dan terealisasi 5,02 % dengan capaian 125,5% dengan kategori **sangat berhasil** hal ini upaya - upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penurunan beban pencemaran air
  - Sertifikasi industri / uji air limbah pada perusahaan-perusahaan di Kab. Kediri
  - Monitoring terhadap penataan peraturan Lingkungan Hidup
  - Pengadaan sarana uji kualitas air beserta perlengkapannya
  - Penyusunan laporan daya dukung dan daya tampung sungai
  - Penyusunan inventarisasi data sungai
  - Pengambilan sampel air (uji kualitas air) pada titik-titik badan air di Kab. Kediri



- Sosialisasi pengelolaan dan pemanfaatan sampah organik dan pengadaan peralatan pengolah sampah domestik
- 2. Penurunan beban pencemaran udara
  - Pengambilan sample udara ámbient dengan metode active sampling
  - Pengambilan sample udara ambient dengan metode passive sampling
  - Penyusunan profil Perubahan Iklim Dampak Gas Rumah Kaca di Kab. Kediri
  - Pengadaan sarana uji kualitas udara beserta perlengkapannya
  - Penanaman bibit tanaman peneduh di kanan kiri jalan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
26. Meningkatkan penataan dan pemanfaatan kawasan daerah sesuai rencana tata ruang	Angka luasan RTH KP publik terbangun di wilayah perkotaan	8,325 (Ha)	9,902 (Ha)	14,745 ( Ha )	148,91	14,745

Sasaran 26 : Meningkatkan penataan dan pemanfaatan kawasan daerah sesuai rencana tata ruang dengan indikator sasaran Angka luasan RTH KP publik terbangun di wilayah perkotaan yang ditargetkan pada tahun 2021 sebesar 9,902 dan terealisasi 14,745 dengan capaian 148,91 termasuk dalam kategori **sangat berhasil**, hal ini upaya - upaya yang dilakukan adalah



pelaksanaan pengawasan terhadap industri/usaha yang berpotensi menghasilkan pencemar, melaksanakan konservasi sumber daya alam, pengoptimalkan pengelolaan sampah dan pembinaan/sosialisasi pengelolaan limbah dan sampah kepada masyarakat. Pembangunan dan renovasi taman *plinth* di jalan kawasan SLG dan Pare .

**Misi 15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat**

**Tujuan : Memberdayakan tenaga kerja sehingga terampil dan berwawasan sebagai upaya menjadikan tenaga kerja yang bermartabat dan berdaya saing**

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
27. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi angkatan kerja	-	67	69,34	103,5	69,34

Sasaran 27 : Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja dengan indikator sasaran Persentase Tingkat Partisipasi angkatan kerjayang ditargetkan tahun 2021 sebesar 67% terealisasi 69,34 % dengan capaian 103,5% dengan kategori **sangat berhasil** , hal ini upaya - upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Adanya Program-program Pelatihan kepada Pencari Kerja
2. Adanya Program-program Kewirausahaan
3. Adanya Program Sosialisasi kepada Masyarakat khususnya bagi Masyarakat Pencari Kerja



Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2021			Kondisi Akhir	
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
28.	Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	Persentase Peningkatan Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jamsostek	-	24	24,01	100,4	24,01

Sasaran 28 : Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan indikator sasaran Persentase Peningkatan Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jamsostek yang ditargetkan tahun 2021 sebesar 24% terealisasi 24,01 dengan capaian 100,4% dengan kategori **sangat berhasil** hal ini upaya - upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan Sosialisasi kepada Perusahaan secara kontinyu dan berkesinambungan untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja di Perusahaan dan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Meningkatkan Pemahaman bagi Pekerja tentang Perlindungan Tenaga Kerja agar Kinerjanya dapat meningkat.



### 3.6. REALISASI ANGGARAN

Pemerintah kabupaten Kediri dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kediri tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 3.8**  
**REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.337.191.772.924,30</b>	<b>2.913.539.409.914,08</b>	87,30
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	2.287.623.155.013,38	1.994.571.255.560,31	87,18
	Belanja Pegawai	1.115.627.883.149,33	1.045.358.508.299,15	93,70
	Belanja Barang dan Jasa	916.725.120.544,05	733.395.231.385,64	80,00
	Belanja Hibah	150.425.147.100,00	131.722.605.511,00	87,56
	Belanja Bantuan Sosial	104.845.004.220,00	84.094.910.364,52	80,20
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>379.419.911.387,92</b>	<b>319.312.867.444,77</b>	84,15
	Belanja Modal Tanah	1.503.750.000,00	739.021.050,00	49,1
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.660.420.966,93	88.389.688.061,53	75,76
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.364.772.832,00	93.665.590.482,04	80,49
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	138.294.864.775,00	130.037.662.941,20	94,02
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.596.102.813,99	6.480.904.910,00	98,25
<b>3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>79.426.511.523,00</b>	<b>34.261.986.572,00</b>	43,13
	Belanja Tidak Terduga	79.426.511.523,00	34.261.986.572,00	43,13
<b>4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>590.722.195.000,00</b>	<b>565.393.300.337,00</b>	95,71
	Belanja Bagi Hasil	23.885.042.000,00	0,00	0
	Belanja Bantuan Keuangan	566.837.153.000,00	565.393.300.337,00	99,74



## **BAB 4**

# **PENUTUP**

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021 disusun berdasarkan pada Indikator dan Target dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021.

Berdasarkan data hasil dan capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, maka diperoleh tingkat efisiensi kinerja terhadap 28 sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 dengan uraian setiap tingkat capaian kinerja 28 sasaran strategis, dan 37 indikator adalah sebanyak 27 indikator sasaran dicapai dengan **Sangat efisien**, kemudian 6 sasaran dicapai dengan **kurang efisien**, Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa seluruh sasaran kinerja yang telah ditetapkan secara umum mampu dicapai dengan **Sangat efisien** yang sekaligus menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2021.

Namun demikian, beberapa tantangan masih perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri kedepan:

1. Perubahan paradigma aparat Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi keluaran (*outcome*) dibanding berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat Kabupaten Kediri dengan upaya dari aparat pemerintah;
2. Melakukan berbagai kebijakan stimulasi program dan kegiatan untuk menggali dan mengembangkan berbagai kegiatan sosial keagamaan dalam rangka meningkatkan kebanggaan terhadap budaya lokal;
3. Terakhir, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.



Selain upaya perbaikan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kediri telah menindaklanjuti hasil Evaluasi SAKIP (rekomendasi) tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri akan menjadi ukuran penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri yang menggambarkan capaian kinerja tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2021 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Kediri.